

Laporan Tahunan 2021

2021 annual report

Jalan untuk Dampak Berkelanjutan

a pathway towards sustainable impacts



Laporan Tahunan 2021

2021 annual report

Jalan untuk Dampak Berkelanjutan



Tahun 2021 adalah tahun perubahan di Yayasan Tifa.

Tahun 2021 merupakan momen penting bagi organisasi untuk merespons perubahan dengan cepat dan tepat, terutama berkenaan dengan cara kami bekerja, membangun kolaborasi internal dan eksternal, serta menjalin komunikasi dengan para mitra dan ragam pemangku kepentingan di tingkat lokal dan nasional. Di tahun ini Tifa melanjutkan transformasi menjadi organisasi yang lebih tangguh, lebih mandiri termasuk dengan mendiversifikasi pendanaan, sekaligus lebih adaptif terhadap kerentanan-kerentanan akibat pandemi yang tidak kunjung selesai.

Transformasi Yayasan Tifa bukanlah merupakan sebuah peristiwa yang singkat, melainkan proses panjang dalam mendefinisikan ulang tujuan serta kerja-kerja yang telah dan akan dilakukan. Tifa percaya transformasi ini dibutuhkan, atas dasar pemikiran bahwa organisasi yang tangguh dibangun dengan pondasi dasar yang secara konsisten berevolusi, menyesuaikan diri terhadap perubahan

dan perkembangan zaman untuk mencapai visi Tifa. Bagi Tifa, transformasi ini tidak hanya bertujuan untuk bertahan di tengah kondisi ekonomi yang berubah, tetapi juga menjadi jalan untuk menangkap peluang baru dan merespons tantangan dengan lebih gesit. Secara singkat, transformasi ini adalah upaya Tifa membangun institusi yang lebih tangguh.

Yayasan Tifa optimis dengan menjadi lebih tangguh, dampak yang diraih dari program serta dukungan yang diberikan, akan berjalan dengan lebih berkelanjutan; meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terpinggirkan menuju terlaksananya pemenuhan hak asasi manusia yang adil di Indonesia. Kegigihan Tifa untuk berkontribusi menghasilkan dampak-dampak tersebut akan terus direalisasikan, mengingat terwujudnya masyarakat yang terbuka di Indonesia tetap menjadi cita-cita yang akan terus diperjuangkan oleh Yayasan Tifa.

Daftar Isi

Pendahuluan — 6

- 6 Lini Masa Perjalanan Tifa Menuju Kemandirian
- 8 Pesan Dewan Pengurus
- 10 Sambutan Direktur Eksekutif

Ikhtisar Kinerja 12

- 14 Strategi Program
- 15 Dampak Program

Profil Organisasi Yayasan Tifa — 22

- 23 Tentang Yayasan Tifa
- 24 Nilai-Nilai Yayasan Tifa
- 25 Profil Kepemimpinan
- 27 Struktur Yayasan Tifa

Program dan Dukungan Yayasan Tifa — 28

- 30 Menyambut Tantangan Masa Depan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 33 Mendorong Program Pembangunan yang Efisien, Transparan, & Akuntabel Lewat Partisipasi Aktif Masyarakat
- 37 Memperjuangkan Upaya Perlindungan Hak-hak Kelompok Rentan
- 40 Mendorong Pembentukan KKR Nasional sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia
- 43 Upaya Membuka Gerbang Keadilan di Tanah Papua
- 47 Menyembuhkan Luka Konflik dan Pelanggaran HAM di Aceh


































- 50 Menyuburkan Nilai Toleransi di Lingkungan Pendidikan
- 53 Menyusun Aksi Jauhi Sanksi Pidana Mati

Komunikasi Yayasan Tifa 56

Melanjutkan Jalan ke Depan — 59

Laporan Keuangan — 63

Lini Masa Tifa Menuju Kemandirian

<p>2000</p> <p> Tiga belas tokoh masyarakat sipil mendirikan Yayasan Tifa pada 8 Desember 2000, dengan mengusung visi “mewujudkan masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan”</p>	<p>2001</p> <p> 49 Inisiatif di 13 provinsi</p> <p> Tata Pemerintahan, HAM, dan Pemerintahan Daerah</p>	<p>2002</p> <p> 901.380 USD</p> <p> 64 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (1,5%), Jejaring OSI (20,6%), Peningkatan Kapasitas OMS (18,9%), HAM (29,2%), dan Pemerintahan Daerah (30,7%)</p>	<p>2003</p> <p> 1.959.875 USD</p> <p> 107 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (41,5%), Media (2,1%), Peningkatan Kapasitas OMS (25,5%), HAM (22,7%), dan Pemerintahan Daerah (17,4%)</p>
<p>2004</p> <p> 2.360.650 USD</p> <p> 97 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (39,6%), Pluralisme (12,7%), Media (10%), Peningkatan Kapasitas OMS (6,8%), HAM (22,5%), dan Pemerintahan Daerah (11,7%)</p>	<p>2005</p> <p> 1.470.355 USD</p> <p> 96 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (15,7%), Pluralisme (25,1%), Media (15,6%), Peningkatan Kapasitas OMS (7,8%), HAM (16%), dan Pemerintahan Daerah (19,6%)</p>	<p>2006</p> <p> 1.622.239 USD</p> <p> 85 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (0,4%), Pluralisme (13,8%), Media (7%), Peningkatan Kapasitas OMS (6,8%), HAM (54,1%), dan Pemerintahan Daerah (14%)</p>	<p>2007</p> <p> 1.661.297 USD</p> <p> 78 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (40,9%), Pluralisme (7,8%), Media (15,6%), Peningkatan Kapasitas OMS (6,7%), HAM (17,4%), dan Pemerintahan Daerah (15,1%)</p>
<p>2008</p> <p> 2.426.048 USD</p> <p> 104 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (16,1%), Pluralisme (8,7%), Media (26,6%), HAM (30,6%), dan Pemerintahan Daerah (18%)</p>	<p>2009</p> <p> 2.186.333 USD</p> <p> 93 Inisiatif</p> <p> Demokrasi & Masyarakat Sipil (15,1%), Pluralisme (14,8%), Media (25,7%), HAM (17,9%), Buruh Migran (6,7%), dan Pemerintahan Daerah (19,9%)</p>	<p>2010</p> <p> 2.938.817 USD</p> <p> 94 Inisiatif</p> <p> Media & Informasi (29,1%), HAM & Keadilan (28,3%), Buruh Migran (2,8%), dan Demokrasi & Pemerintahan (39,7%)</p>	<p>2011</p> <p> 3.111.192 USD</p> <p> 90 Inisiatif</p> <p> Media & Informasi (30%), HAM & Keadilan (27,9%), Buruh Migran (5,2%), dan Demokrasi & Pemerintahan (37%)</p>



2012	2013	2014	2015
<ul style="list-style-type: none"> 3.609.092 USD 93 Inisiatif Media & Informasi (24%), HAM & Keadilan (27%), Buruh Migran (21%), dan Demokrasi & Pemerintahan (28%) 	<ul style="list-style-type: none"> 2.397.486 USD 157 Inisiatif Media & Informasi (27,5%), HAM & Keadilan (27,2%), Buruh Migran (12,8%), Pemberdayaan Masyarakat Miskin (1,3), dan Demokrasi & Pemerintahan (31,2%) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.463.518 USD 43 Inisiatif Media & Informasi (30,7%), Keadilan & Keberagaman (20,1%), Pengurangan Kemiskinan & Buruh Migran (7,7%), dan Demokrasi & Pembangunan (41,5%) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.940.501 USD 59 Inisiatif Media & Informasi (56%), HAM & Keadilan (31,9%), Perlindungan Buruh Migran (4,8%), dan Inisiatif Papua (6,7%)
2016	2017	2018	2019
<ul style="list-style-type: none"> 1.447.614 USD 31 Inisiatif Hak Digital & Informasi (20,9%), HAM (44,5%), dan Penegakan Hukum & Reformasi Peradilan (34,6%) 	<ul style="list-style-type: none"> 1.753.531 USD 21 Inisiatif Pendalaman Demokrasi & Partisipasi Inklusif (9,7%), Pengembangan & Tata Kelola Ekonomi (40,8%), dan Penegakan Hukum & Reformasi Peradilan (49,5%) 	<ul style="list-style-type: none"> 2.158.217 USD 33 Inisiatif Pendalaman Demokrasi & Partisipasi Inklusif (18,9%), Tata Kelola & Pemajuan Ekonomi (25,6%), dan Reformasi Peradilan & Peraturan Perundangan (55,5%) 	<ul style="list-style-type: none"> 2.897.815 USD 35 Inisiatif Demokrasi (24,7%), Pemberdayaan Hukum Masyarakat Miskin (4,8%), Tata Kelola & Pemajuan Ekonomi (35,8%), dan Reformasi Peradilan & Supremasi Hukum (34,7%)
2020	2021	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah dana hibah yang dikelola Jumlah inisiatif organisasi masyarakat sipil (OMS) yang didukung Tema kunci yang diusung (berserta persentase alokasi dana hibah) 	
<p>Tahun ini dimulainya independensi Yayasan Tifa yang tidak lagi menjadi jaringan dari Open Society Foundation. Di tahun ini, strategi organisasi Yayasan Tifa sudah berubah. Yayasan Tifa mengelola anggaran program dengan total nilai IDR8,8 Milyar, mendukung 18 inisiatif OMS dan mengusung 4 tema kunci yang merujuk pada pilar organisasi (% Distribusi): Keadilan (52,0%), Kesenjangan (25,7%), Keterbukaan (12,8%), dan Kebhinnekaan (9,4%)</p>	<p>Yayasan Tifa mulai memantapkan diri memasuki babak baru sebagai lembaga perantara (<i>intermediary organization</i>) dengan pendekatan multi-donor. Pada fase awal ini Tifa mengelola anggaran program dengan total nilai IDR9,3 Milyar, mendukung 19 inisiatif OMS dan mengusung 4 tema kunci yang merujuk pada pilar organisasi (% Distribusi): Keadilan (60,6%), Kesenjangan (17,0%), Keterbukaan (20,3%), dan Kebhinnekaan (2,2%)</p>		

PENDAHULUAN

Pesan Dewan Pengurus



Endy Bayuni
Ketua Dewan Pengurus
Yayasan Tifa



Tahun 2021 ini Yayasan Tifa fokus pada pendalaman demokrasi, pemenuhan hak asasi manusia terutama untuk kelompok rentan dan termarginalkan, penegakkan keadilan serta akuntabilitas data digital. Selain itu, di tahun ke-21 setelah berdiri, Yayasan Tifa juga mencoba mengatasi dan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan baru yang dibawa oleh pandemi Covid-19 yang tidak kunjung usai, termasuk juga proses transisi internal Tifa di tahun kedua yang tidak lagi menjadi lembaga donor semata. Pandemi yang telah berjalan di tahun kedua bisa dikatakan telah mengubah cara bekerja Yayasan Tifa makin membuat upaya kami memperdalam kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi lebih keras dari sebelumnya. Keadaan ini telah menunjukkan keterkaitan antar agen pembangunan di Indonesia dan menyadarkan betapa pentingnya kerja sama saling mendukung dalam upaya-upaya memperkuat masyarakat Indonesia.

Perubahan karena Covid-19 juga proses transisi internal Tifa ini banyak berperan mendorong Yayasan Tifa menjadi lembaga yang lebih terbuka

“Mengawal Yayasan Tifa melalui fase tumbuh yang baru di tahun lalu merupakan pengalaman yang luar biasa. Berkat visi dan resiliensi yang ada, saya percaya etape baru Yayasan Tifa akan jadi lebih berwarna.”

dan fleksibel. Fleksibilitas ini memungkinkan kami untuk menjalin kerja sama dengan berbagai mitra, membangun jaringan kolaborasi yang lebih luas, dan aktif berkontribusi dalam mencapai tujuan mewujudkan masyarakat yang terbuka di Indonesia. Dalam proses ini, kami berterima kasih atas panduan dan dukungan yang diberikan oleh para mitra strategis yang telah urun saran dan pandangan untuk memperkuat program-program Yayasan Tifa di bidang demokrasi, keadilan, hak asasi manusia, media, dan teknologi. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para donor yang telah memercayai Yayasan Tifa dengan penuh. Kami berharap semua dukungan dan kerja sama yang telah terjalin akan terus terjaga dan menjadi semakin kuat.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin merayakan capaian yang telah diraih bersama Yayasan Tifa di tengah transformasi dan pertumbuhan yang terjadi. Mengawal Yayasan Tifa melalui fase tumbuh yang baru di tahun lalu merupakan pengalaman yang luar biasa. Berkat visi dan resiliensi yang ada, saya percaya etape baru Yayasan Tifa akan jadi lebih berwarna. Saya berterima kasih kepada segenap anggota dewan dan seluruh jajaran kantor eksekutif Yayasan Tifa yang telah menunjukkan dedikasi dan kepeduliannya selama satu tahun ke belakang. Mengingat semua itu dicapai sebagian besar secara virtual dan terpisah satu sama lain, membuat capaian-capaian yang diraih semakin bermakna. Melihat semua dinamika dan pencapaian tersebut, saya percaya bahwa upaya kita untuk

mempromosikan masyarakat terbuka di Indonesia pada masa-masa ini adalah sebuah kerja yang luar biasa.

Pada tahun 2021 Yayasan Tifa berupaya mengimplementasikan program dengan pendekatan segitiga: hak asasi manusia, manajemen Sumber Daya Alam dan tata kelola data. Program-program ini berjalan beriringan dengan berbagai kegiatan yang berkolaborasi dengan para donor (nasional dan internasional) serta mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau pemangku kepentingan secara nasional dan memberdayakan beragam kelompok masyarakat di Indonesia. Dengan fokus pada pertumbuhan gerakan dan institusional, kami di Yayasan Tifa berkomitmen akan terus menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan lokal, nasional, dan internasional, mengalokasikan sumber daya yang kami miliki bersama untuk memperjuangkan masyarakat yang terbuka, setara, adil, dan bineka.

Dengan urgensi yang semakin meningkat pada aspek penegakkan keadilan dan pemenuhan hak asasi manusia masyarakat Indonesia, peran Yayasan Tifa akan kian vital dalam menciptakan solusi untuk tantangan-tantangan yang muncul dari aspek-aspek tersebut. Mari kita sambut tahun yang baru dengan optimisme dan ambisi untuk meraih capaian yang lebih signifikan dari tahun sebelumnya.

PENDAHULUAN

Sambutan Direktur Eksekutif



Shita Laksmi
Direktur Eksekutif
Yayasan Tifa



Dimulainya tahun yang baru menghadirkan momen bagi kita untuk merefleksikan tentang apa yang telah terjadi dalam kurun waktu satu tahun sebelumnya sekaligus memberi kita waktu untuk mencerna tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam waktu satu tahun ke depan. Namun, harus diakui saat ini skala ketidakpastian tidak dapat lagi diprediksi yang berpotensi

mengaburkan ekspektasi. Dalam kondisi yang tidak pasti ini, satu hal yang dijamin kepastiannya adalah bahwa dunia kini telah jadi begitu berbeda, dan jelas perlu kerja ekstra untuk menyesuaikan diri dengan perubahan dan perbedaan ini. Yayasan Tifa di tengah kerentanan dan ketidakpastian ini berupaya sekuat mungkin beradaptasi agar dapat melanjutkan komitmennya dalam menghadapi berbagai tantangan sosial seperti ketimpangan, akses terhadap keadilan, adaptasi teknologi, serta penurunan kualitas lingkungan, sambil terus menjadi penyambung suara kelompok-kelompok rentan dan termarjinalkan.

Kini, kenormalan baru telah menghadirkan peluang baru bagi Yayasan Tifa untuk melakukan perbaikan dan mendorong kemajuan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. Namun, terlepas dari peluang tersebut, fokus dan komitmen untuk menghadapi tantangan-tantangan yang disebutkan sebelumnya tetap harus terjaga. Untuk menjaga fokus ini, Yayasan Tifa telah memetakan kembali program-program strategis yang menjadi prioritas untuk menangkap peluang sekaligus mengatasi tantangan-tantangan baru yang berpotensi muncul di masa yang akan datang.

Pertama, kami akan fokus memperkuat sinergi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan akses keadilan bagi semua warga negara. Ada kebutuhan mendesak bagi kita untuk bekerja bersama mengatasi kasus pelanggaran hak asasi manusia serta mencegahnya supaya tidak terjadi di masa depan. Situasi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, telah menunjukkan status yang mengkhawatirkan. Hal ini ditunjukkan dari pemenuhan hak-hak dasar manusia yang melemah, terutama dalam lingkup agama, gender, dan orientasi seksual. Di sisi lain, masih juga didapati banyak kelompok masyarakat yang terbatas aksesnya pada keadilan akibat ketidaktahuan akan di mana atau bagaimana mencari pembelaan terhadap kelakuan aktor-aktor yang represif.

Kedua, kami ingin menekankan upaya menegakkan keadilan sumber daya alam dan lingkungan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Sumber daya alam sangat vital bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Sumber daya ini berperan sebagai sumber penghidupan sekaligus mata pencaharian, seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selain itu, kelestarian lingkungan selama ini juga telah menjadi dasar bagi sistem pengetahuan lokal dan adat istiadat yang telah dikembangkan dan diwariskan secara turun-temurun.

Namun, dewasa ini, masyarakat yang terpinggirkan, seperti masyarakat adat, menjadi semakin terbatas aksesnya untuk memanfaatkan atau memiliki sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan, seperti tanah, air, mineral, sumber daya perikanan, dan areal perkebunan. Selain aksesnya yang semakin terbatas, mereka juga dihadapkan pada masalah lingkungan yang serius akibat praktik pembangunan yang tidak berkelanjutan dan membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Keadaan ini menjadi pendorong bagi Yayasan Tifa untuk lebih lanjut mengadvokasi dan berperan dalam membangun ketahanan hidup kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam koridor pemanfaatan sumber daya alam.

Ketiga, program strategis Yayasan Tifa juga akan berfokus pada pendalaman demokrasi dan inovasi

gerakan sosial. Setelah dua dekade lepas dari orde baru, Indonesia kini telah menyaksikan kebangkitan gerakan sosial yang kuat, yang sanggup menuntut demokrasi politik dan ekonomi yang lebih besar. Saat ini, seiring dengan tataran demokrasi yang semakin bergejolak, Yayasan Tifa ingin mengeksplorasi inovasi-inovasi dalam praktik gerakan sosial yang bisa membantu memperdalam demokrasi, seperti implementasi strategi mobilisasi yang beragam, advokasi kebijakan dan penetapan agenda pada berbagai skala, komunikasi edukasi yang bersifat populer, upaya diseminasi informasi melalui bentuk media baru, dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga lain.

Terakhir, dengan era yang semakin digital, Yayasan Tifa ingin menempatkan transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital sebagai salah satu pokok kerja kami. Digitalisasi telah memberikan banyak peluang dan manfaat bagi masyarakat. Namun, digitalisasi juga telah menimbulkan ancaman terkait privasi dan perlindungan data pribadi. Ancaman ini berpotensi menjadi semakin parah seiring dengan semakin terkoneksinya kita dengan dunia digital. Oleh karena itu, ketersediaan peraturan dan otoritas yang terbuka, akuntabel, dan dapat diandalkan sangat penting untuk menjamin keamanan masyarakat di ruang maya.

Melalui program-program strategis di atas, Yayasan Tifa akan melanjutkan upayanya mempromosikan masyarakat terbuka di Indonesia. Meskipun bayangan akan volatilitas dan ketidakpastian harus tetap diwaspadai, Yayasan Tifa yakin dengan kemampuan adaptasi yang dipelajari selama dua tahun ke belakang dapat menjadi kunci menghadapi cepatnya perubahan yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Lebih lanjut, artikel-artikel dalam laporan ini juga menjelaskan taktik bagaimana kami dapat terus beradaptasi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat di tengah pandemi yang berkepanjangan, di samping berbagai penjelasan program-program yang dipaparkan. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda menemukan bagian yang menarik dalam laporan ini, selamat membaca!

Ikhtisar Kinerja Yayasan Tifa

Strategi Program
Ikhtisar Program



*Pelatihan Pembuatan Film di Kota Jayapura
Foto: Dok. Papan Voices untuk Yayasan Tifa*

STRATEGI YAYASAN TIFA 2020-2024

Strategi Program

Mensinergikan upaya masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan-kebijakan inklusif yang sesuai dengan nilai HAM dan memenuhi akses terhadap keadilan bagi semua warga.

Capaian:

- Penguatan dan konsolidasi kelompok masyarakat sipil yang mampu mempromosikan dan mengadvokasi tuntutan kebebasan berpikir dan berekspresi.
- Pemerintah dan masyarakat yang pluralis dan toleran yang memenuhi, menghormati, dan melindungi hak-hak kelompok minoritas yang rentan (keyakinan & kelompok minoritas agama, masyarakat adat, LGBTIQ) dan korban pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Memperkuat upaya-upaya pencapaian keadilan sumber daya alam dan lingkungan bagi komunitas terpinggirkan/ marjinal.

Capaian:

- Meningkatnya keberdayaan masyarakat marjinal dalam mengontrol pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan menghormati hak asasi manusia.
- Meningkatnya resiliensi dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim khususnya mereka yang bergantung pada sumber daya alam secara langsung.

Inovasi Gerakan Sosial dan Pendalaman Demokrasi.

Capaian:

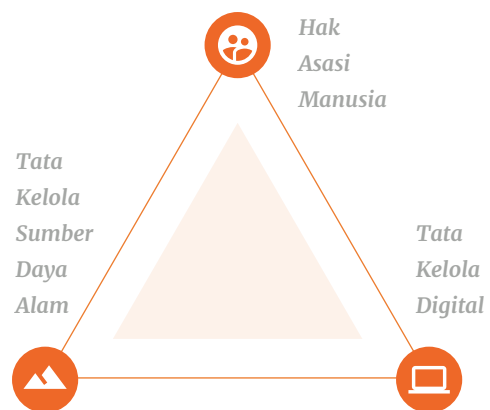
- Pendalaman demokrasi dan menguatnya inovasi gerakan sosial.
- Meningkatnya partisipasi publik dan inovasi dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan proses pembangunan yang inklusif.

Mendorong keterbukaan dan akuntabilitas dalam ekosistem data digital.

Capaian:

- Membaiknya implementasi terkait privasi dan perlindungan data pribadi di area kerja Tifa
- Kelompok masyarakat sipil bisa terlibat secara aktif dalam pengembangan peraturan terkait data digital.

Dalam melaksanakan arahan strategis di atas, Yayasan Tifa menggunakan pendekatan implementasi yang selaras. Pada pertemuan re-strategi Yayasan Tifa di bulan Juni 2021, Tifa memilih pendekatan segitiga dalam mengimplementasi kerangka programnya, yaitu Hak Asasi Manusia, Tata Kelola Sumber Daya Alam dan Tata Kelola Digital.



Kedepannya, Tifa akan lebih memperkaya mekanisme kerja pendekatan ini dengan membangun dokumen pelengkap yang lebih komprehensif. Diharapkan pendekatan ini mampu mendorong inovasi di lingkungan Yayasan Tifa serta membuat program Tifa menjadi lebih unik.

Dampak Program

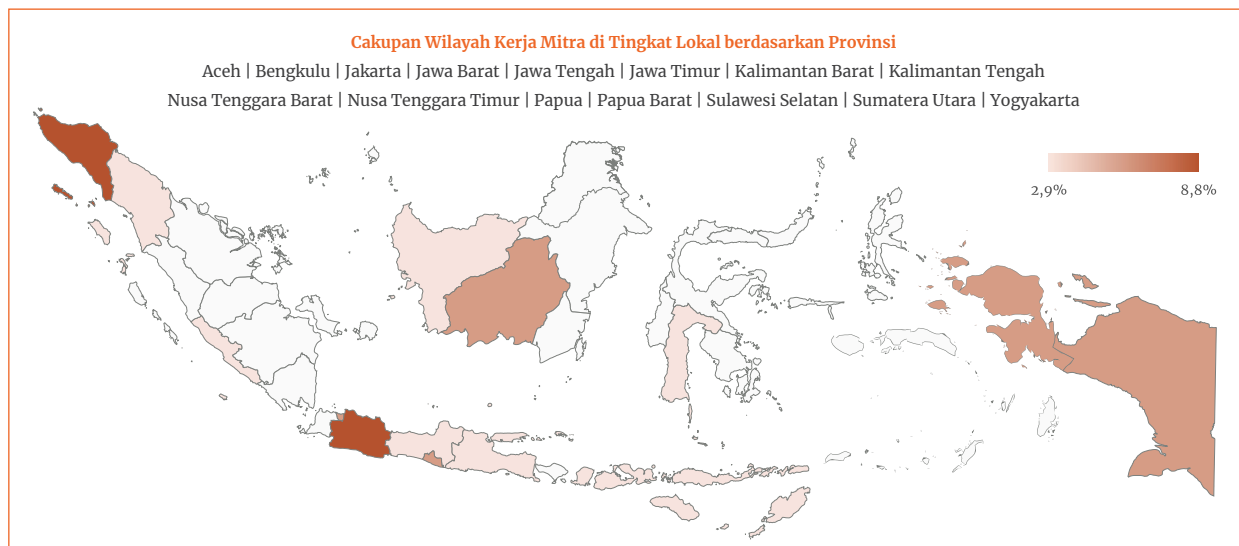
1. Mitra dan Penerima Manfaat

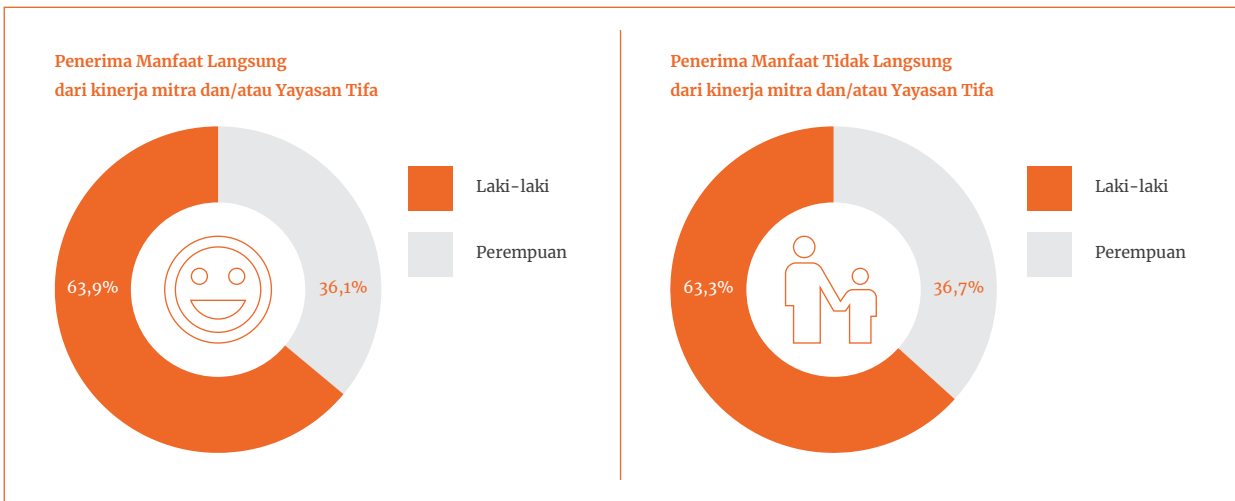
Hingga akhir tahun 2021, Yayasan Tifa bekerja sama dan melayani sedikitnya 19 mitra organisasi yang bekerja baik di tingkat lokal maupun nasional. Cakupan wilayah kerja mitra tersebar dengan perbandingan sebesar 70,6% di tingkat lokal dan 29,4% di tingkat nasional.

Jumlah total penerima manfaat program yang teridentifikasi oleh mitra dan/atau Yayasan Tifa dibagi menjadi dua kriteria, yaitu penerima manfaat langsung yang secara individu mencapai 3.115 orang dan penerima manfaat tidak langsung yang secara individu mencapai 70.910 orang. Penerima manfaat langsung atau pemangku hak primer Yayasan Tifa, merupakan individu maupun organisasi yang terlibat langsung dan mendapat manfaat dari kinerja mitra dan/atau Yayasan Tifa. Sedangkan penerima manfaat tidak langsung atau pemangku hak sekunder Yayasan Tifa merupakan individu maupun organisasi yang tidak terhubung langsung dengan kinerja

Pada aspek penerima manfaat ini, dapat terlihat bahwa Yayasan Tifa melalui kerja sama dan kinerja mitra telah berhasil mendorong pelibatan aktif perempuan sebagai pemangku hak, baik primer maupun sekunder, sebesar lebih dari 35%. Gambaran ini menunjukkan bahwa Yayasan Tifa benar-benar berkomitmen serta menjunjung tinggi upaya-upaya yang mendorong kesetaraan dan penghapusan terhadap diskriminasi di Indonesia. Yayasan Tifa menempatkan pengarusutamaan gender utamanya dengan memastikan partisipasi aktif dan bermakna bagi masyarakat untuk mendorong pembuatan kebijakan agar memiliki kualitas yang terus meningkat dan memiliki relevansi yang lebih besar bagi masyarakat dalam merespons kebutuhan seluruh warga negara secara lebih efektif.

Selain masyarakat umum, di tahun 2021 Yayasan Tifa juga bekerja untuk beberapa kelompok masyarakat rentan dan termarjinal yang menjadi penerima manfaat kinerja mitra Yayasan Tifa, antara lain: kelompok korban pelanggaran HAM dan korban





pelanggaran HAM berat masa lalu, kelompok korban pada isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB), masyarakat adat, nelayan, buruh dan buruh migran, petani pekerja dan petani pemilik lahan, jurnalis, kelompok masyarakat disabilitas, kelompok masyarakat minoritas agama, kelompok masyarakat minoritas gender dan seksualitas, kelompok muda, dan lain sebagainya. Yayasan Tifa berkomitmen untuk terus meningkatkan pelibatan tersebut serta terus memperluas jangkauannya pada kelompok masyarakat rentan dan termarginal lainnya dalam mempromosikan masyarakat terbuka di Indonesia.

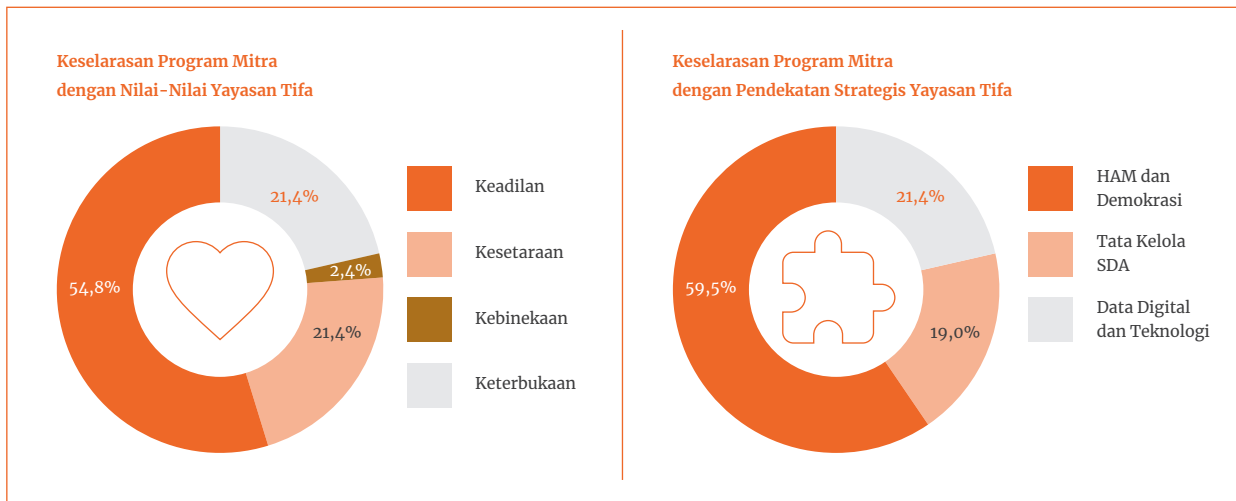
Selain menysasar individu, Yayasan Tifa juga mendorong pelibatan aktif pemangku kepentingan organisasi atau institusi baik di tingkat nasional maupun lokal, antara lain namun tidak terbatas pada: Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Pemerintah Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, Aparat Penegak Hukum dan Kepolisian, Lembaga Independen Negara bidang Hukum dan HAM, Organisasi Bantuan Hukum, Organisasi dan/atau Asosiasi Profesi, serta Institusi Swasta.

2. Keselarasan Program Mitra dengan Nilai-nilai dan Pendekatan Strategis Yayasan Tifa

Di tahun 2021, Tifa menguatkan mekanisme kerja sama dengan pendekatan kemitraan strategis yang dinilai lebih efektif dalam menysasar dampak yang berkelanjutan. Kemitraan strategis yang dimaksud adalah dengan membangun kolaborasi kerja

yang mengusung kesetaraan antara Yayasan Tifa dan Mitra. Pendekatan kerja sama ini kemudian dikembangkan berlandaskan pada nilai-nilai Yayasan Tifa dan diselaraskan dengan arahan strategis yang digunakan oleh Yayasan Tifa untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai organisasi yang mendukung kerja-kerja masyarakat sipil di Indonesia.

Pada aspek keselarasan program mitra dengan nilai-nilai Yayasan Tifa, dapat ditunjukkan bahwa di tahun 2021 nilai keadilan berkontribusi paling tinggi yaitu sebesar 54,8%. Hal ini juga selaras dengan konteks Indonesia yang masih membutuhkan kerja keras dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, integrasi bisnis dan HAM dalam sistem hukum dan HAM di Indonesia, penguatan resiliensi masyarakat adat dalam menghadapi perubahan iklim dan kehidupan yang sejahtera, realisasi pemulihan hak-hak korban KBB, perlindungan terhadap jurnalis, masyarakat minoritas agama serta minoritas gender dan seksualitas, penguatan masyarakat menuju keadilan air, perumusan konsep dan model dalam pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di wilayah-wilayah yang rentan konflik, keadilan dan HAM untuk buruh migran, dan lain sebagainya, utamanya di tengah kondisi COVID-19. Nilai berikutnya yang juga selaras dengan program mitra, yaitu nilai keterbukaan dan kesetaraan yang berkontribusi masing-masing sebesar 21,4%, kemudian nilai kebinekaan sebesar 2,4%.



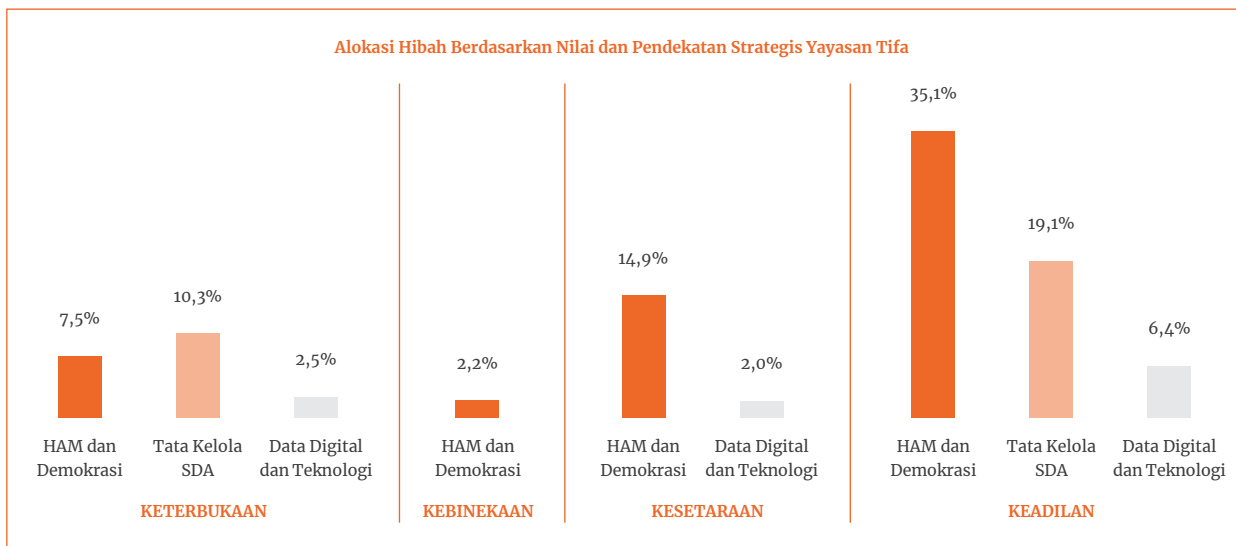
Sedangkan jika ditinjau berdasarkan pendekatan strategis Yayasan Tifa, keselarasan program mitra paling besar berkontribusi pada isu HAM dan demokrasi, yaitu sebesar 59,5%. Kemudian isu transparansi dan akuntabilitas tata kelola data digital dan teknologi sebesar 21,4%, dan isu tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan sebesar 19,0%.

3. Alokasi Hibah Berdasarkan Nilai-nilai dan Pendekatan Strategis Yayasan Tifa

Pada tinjauan aspek alokasi hibah yang disalurkan kepada mitra, akan terlihat bagaimana Yayasan Tifa menempatkan fokus dukungan yang diberikan terhadap mitra terhadap perannya dalam mempromosikan masyarakat terbuka di Indonesia

yang dikontekstualisasi berdasarkan kondisi dan situasi yang berlangsung di tahun 2021.

Isu keadilan dalam penegakan HAM dan demokrasi terhadap warga negara menjadi perhatian penting bagi Yayasan Tifa di Tahun 2021, dengan kontribusi alokasi anggaran sebesar 35,1% dari total anggaran hibah yang disediakan. Kemudian pada isu yang berkaitan dengan keadilan dalam tata kelola SDA sebesar 19,1%, isu kesetaraan dalam HAM dan demokrasi sebesar 14,9%, isu keterbukaan dalam tata kelola SDA sebesar 10,3%, serta isu keadilan dalam kaitannya terhadap transparansi dan akuntabilitas tata kelola data digital dan teknologi yang muncul sehubungan dengan situasi COVID-19 sebesar 6,4%, dan seterusnya.



4. Dampak Dukungan Yayasan Tifa

Di tahun 2021, dampak kinerja program yang dihasilkan oleh mitra dengan dukungan Yayasan Tifa, antara lain namun tidak terbatas pada:

- Dalam upaya mendorong kebijakan Pemerintah terhadap pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Nasional sebagai upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, mitra telah berhasil membangun kesepakatan di antara pembela HAM, OMS yang mendampingi korban, serta sebagian besar komunitas korban, bahwa pilihan kebijakan Pemerintah melalui jalur non-yudisial tidak memerlukan adanya dikotomi dengan pilihan yudisial. Eksistensi komisi kebenaran menjadi salah satu aspek penting dalam memenuhi hak korban tanpa menegasikan proses yudisial dan pemulihan. Meskipun Pemerintah hingga saat ini masih menyatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu perlu ditempuh menggunakan dua jalur berdasarkan konteks dan karakteristik kasusnya masing-masing, gugus kerja Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) masih akan terus mengawal penandatanganan Rancangan Peraturan Presiden tentang Komisi Kebenaran yang merupakan hasil dialog ragam pemangku kepentingan, termasuk aktivis/pegiat HAM dan pendamping korban dengan Tim dari Kemenkopolkham.
- Dalam upaya mempersiapkan modalitas terhadap integrasi *Business and Human Rights* (BHR) ke dalam sistem hukum dan HAM di Indonesia, mitra telah berhasil membangun diskursus dan kesadaran publik terkait dinamika instrumen hukum dan HAM yang bersifat *legal binding* bagi pemerintah dan utamanya masyarakat sipil, serta secara terbatas pada pihak korporasi. Pemerintah dan masyarakat sipil menjadi penerima manfaat terbesar dalam proses ini, khususnya pada tataran pemahaman terkait instrumen yang mengikat secara hukum dan HAM. Namun diperlukan upaya terus menerus dalam pemantauan peningkatan pemahaman tersebut, utamanya pada tindak lanjut Pemerintahan atas pembentukan kebijakan dalam rangka mempersiapkan modalitas yang dimaksud.
- Dalam upaya penguatan resiliensi Komunitas Kampung Darim, Kabupaten Indramayu, dalam menghadapi dampak perubahan iklim untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, mitra telah berhasil meningkatkan kesadaran petani mengenai perubahan di lingkungan mereka terkait tantangan perubahan iklim. Petani menjadi lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat mengidentifikasi perubahan iklim yang terjadi dan merumuskan indikator-indikator yang diperlukan oleh komunitas terkait kerentanan dan ketahanan, serta menentukan mekanisme adaptasi yang diperlukan dalam mengatasi perubahan tersebut. Selain itu, komunitas juga telah dapat merumuskan kerangka strategis dalam meningkatkan kapasitas adaptif terhadap perubahan iklim.
- Dalam upaya realisasi pemulihan hak-hak korban KBB di Jawa Timur dan NTB, mitra telah berhasil menguatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah di NTB dan Jawa Timur untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak bagi pengungsi Syiah Sampang dan JAI. Dalam konteks JAI di NTB, mitra juga telah berhasil memastikan adanya Surat Gubernur NTB kepada Kementerian PUPR terkait dengan permohonan bantuan rumah gratis bagi pengungsi JAI, yang di dalamnya terdapat pemetaan terhadap situasi tanah yang hendak dibangun untuk rumah tinggal pengungsi. Selain itu, pendampingan yang dilakukan telah berhasil mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar (kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya) bagi pengungsi di Transito, sehingga seluruh pengungsi telah mendapatkan hak-hak dasarnya.
- Dalam upaya konsolidasi organisasi media untuk perlindungan jurnalis, mitra membangun pelibatan dan partisipasi aktif ragam pemangku kepentingan melalui proses dialog konstruktif, antara lain: aparat penegak hukum, Dewan Pers,

asosiasi jurnalis, manajemen organisasi media hingga OMS yang berfokus pada kebebasan pers dan perlindungan HAM. Dalam proses tersebut, mitra telah menghasilkan naskah standar perlindungan jurnalis dan modul keamanan bagi jurnalis. Dokumen tersebut telah disampaikan kepada redaktur dan pimpinan beberapa organisasi media serta diserahkan kepada Dewan Pers dan berkomitmen untuk mensosialisasikannya kepada organisasi media se-Indonesia.

- Dalam upaya menjamin suara korban melalui pendekatan budaya untuk mendukung upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, mitra telah berhasil mengembangkan narasi-narasi baru mengenai pelanggaran HAM berat masa lalu untuk mengantisipasi stigma terhadap korban. Selain itu, mitra juga telah berhasil membangun perubahan sudut pandang kelompok muda terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu yang dijangkau melalui berbagai media sosial dan platform yang biasa digunakan oleh kelompok muda. Inisiatif dan dukungan langsung untuk kelompok korban juga disediakan oleh mitra menuju pemulihan korban.
- Dalam upaya konsolidasi masyarakat sipil dan masyarakat terdampak praktik korporasi untuk advokasi Bisnis dan HAM, mitra telah berhasil melanjutkan kampanye nasionalnya melawan ekstraksi Mineral dan Batubara, serta Omnibus Law. Legislatif telah memberlakukan undang-undang tersebut pada awal 2021, salah satu pasal yang disoroti adalah adanya Pasal 169A yang mengatur perpanjangan Kontrak Kerja (KK)/Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/Perjanjian Kerja Konsesi Pertambangan Batubara (KK) tanpa lelang. Dengan adanya peraturan ini, pengusaha tambang kemudian dapat memperpanjang KK dan PKP2B tanpa melakukan prosesi lelang. Selain itu, penghapusan Pasal 165 dalam undang-undang ini, yang mengatur penerbitan sanksi bagi pihak-pihak yang menerbitkan izin usaha yang bertentangan dengan UU Minerba, juga disinyalir dapat melindungi pejabat negara yang menerbitkan izin bermasalah. Demikian halnya dengan Omnibus Law yang alih-alih memuat semangat menjaga investasi dengan menghapus beberapa ketentuan krusial dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga dipandang bermasalah karena merampas hak-hak buruh untuk mempermudah investasi bisnis.
- Dalam upaya *Reclaiming Water Resources*, penguatan kapabilitas warga menuju keadilan air, mitra telah berhasil mengajukan gugatan *Judicial Review* terhadap Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.16/2020 tentang Tata cara penyambungan dan Pemakaian Air Minum. Meskipun kasus ini masih dalam proses, Gubernur DKI Jakarta menanggapi upaya mitra dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang menguntungkan masyarakat yang terpinggirkan, seperti pengurangan tarif air dan subsidi untuk kelompok penduduk yang sebelumnya tidak dilayani oleh perusahaan pengelola air.
- Dalam upaya membangun konsensus masyarakat sipil untuk merumuskan konsep dan model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua, mitra akan terus melakukan advokasi dalam mendorong peraturan Presiden terkait pembentukan pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua.
- Dalam upaya mengelola perbedaan dalam keberagaman di lingkungan Sekolah Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mitra telah berhasil membangun pembelajaran bahwa meskipun prinsip pluralisme tercakup dalam berbagai kebijakan, namun persoalan internalisasi dan implementasi masih tetap menjadi persoalan dan masih melanggengkan intoleransi berbasis identitas politik terhadap kelompok agama minoritas. Dari tahun 2000 hingga 2019, mitra mencatat adanya sekitar 89 insiden yang disebabkan oleh intoleransi, dan berujung pada penobatan Yogyakarta sebagai kota intoleran.

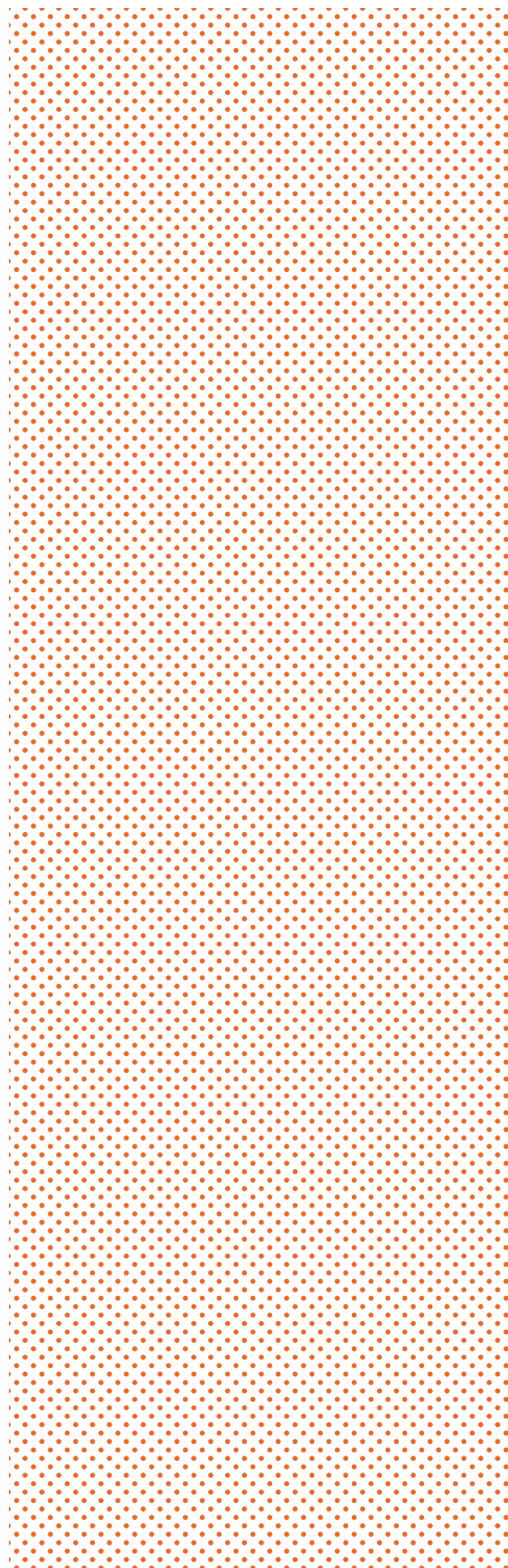
- Dalam upaya penguatan sistem pencegahan eksekusi dan hukuman mati di Indonesia, mitra telah berhasil meningkatkan kapasitas advokat dalam membangun perspektif kriminologi dan viktimologi hukuman mati, pemanfaatan penelitian hukum dan sosial untuk kasus hukuman mati, perspektif hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, perkembangan global gerakan penghapusan hukuman mati, serta tantangan dan peluang pendampingan kasus hukuman mati. Selain itu, mitra juga telah berhasil mengidentifikasi dan mendalami 402 kasus hukuman mati di Indonesia sejak awal 2000 hingga 2020, dan akan terus berupaya mengembangkan sistem pemantauan kasus yang mampu mengidentifikasi orang-orang yang rentan mendapat hukuman mati, serta lebih proaktif dalam dukungan pendampingan kasus tersebut.
- Dalam upaya pembentukan Paralegal Komunitas Masyarakat Adat dalam Advokasi Anggaran Bantuan Hukum Kampung di Kampung Klabili, Distrik Selemkai, Kabupaten Tambora dan Kampung Yeflio, Distrik Mayamuk Kabupaten Sorong, mitra telah berhasil mengakomodasi program bantuan hukum dalam anggaran kampung serta tumbuhnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat terkait Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Anak. Terbentuknya Paralegal Komunitas Adat ditingkat Kampung memberi manfaat yang sangat besar dalam membangun kesadaran hukum bagi warga, selain itu ada komitmen dari pemerintah Kampung dan Kelurahan dalam memberikan dukungan demi keberlanjutan kerja-kerja Paralegal Komunitas Adat.
- Dalam upaya koordinasi Desain Aplikasi Sistem Pengelolaan Data dan Informasi KKR Aceh, mitra telah berhasil membangun desain yang tepat untuk mengakomodir segala kebutuhan terhadap pengelolaan data dan informasi di KKR Aceh. Antara lain dengan membangun integrasi antara kebutuhan informasi antar Pokja yang menjadi bahan untuk sistem database.

5. Dampak Implementasi Langsung Program Tifa

- Melalui kerja sama dengan Japan Initiative (JI) dan dukungan dari Kementerian Luar Negeri Jepang, Yayasan Tifa telah melaksanakan Uji Coba Implementasi “Program Review” di Indonesia dengan dua desa sebagai *pilot project* (Desa Sriharjo dan Desa Guwosari) untuk menghasilkan pembelajaran rekomendasi dari hasil pelaksanaan metode Program Review di Indonesia. Program Review diperkenalkan kepada aparat pemerintah baik di tingkat Kabupaten maupun Desa dengan sejumlah Aparat Sipil Negara (ASN) dan Aparat Pemerintah Desa turut serta dan menyelesaikan Pelatihan Program Review. Pada prosesnya masyarakat di 2 (dua) desa yang menjadi lokasi *project* juga mengikuti dan menyelesaikan Pelatihan Program Review serta pelatihan mengenai pemahaman proses penganggaran pemerintah. Program ini telah berhasil membangun pelibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada tahap tinjauan program sebagai pendekatan evaluasi program yang inklusif serta menghormati pembagian peran asli di antara para pemangku kepentingan di tingkat desa. Keterlibatan BPD sebagai bagian dari ‘Panitia Pelaksana’ telah membantu memastikan keberlanjutan proyek, sehingga pemerintah desa termasuk BPD mampu mengadopsi dan menginisiasi Program Review secara mandiri di masa mendatang.
- Melalui kerja sama dan dukungan langsung dari Meta, Yayasan Tifa telah berhasil mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan beragam kelompok pemangku kepentingan di Indonesia mengenai pengaturan dan implementasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Beberapa topik yang disepakati antara lain hak-hak subjek data dan basis hukum terkait dengan pembentukan otoritas PDP, yang dapat menyeimbangkan pertumbuhan inovasi dan ekonomi bagi pelaku industri digital dengan beragam ukuran dan kapasitas serta PDP bagi publik.

Yayasan Tifa juga telah berhasil melahirkan dua *policy brief*: Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna bagi Indonesia (tifafoundation.id/PolicyBriefPDP1) dan Indonesia Menuju Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna (tifafoundation.id/PolicyBriefPDP2) yang tidak hanya terbatas pada pemetaan tantangan dan kebutuhan yang dihadapi oleh beragam pemangku kepentingan dari sektor privat dan publik di Indonesia, tetapi juga membangun hubungan dan jembatan dialog di antara beragam kelompok tersebut. Hasil dari kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi Kementerian dan Lembaga serta DPR dalam pengambilan keputusan terkait pengaturan di RUU PDP dan atau peraturan turunannya.

- Melalui kerja sama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Yayasan Tifa telah melaksanakan implementasi tahun pertama program HEAL (Promoting Human Rights and Equality to Achieve Sustainability). Tahun pertama program ini Yayasan Tifa telah berhasil mendokumentasikan bentuk-bentuk pelanggaran HAM (termasuk hak anak) yang berlangsung selama pandemi COVID-19. Pihak Pemerintah daerah juga telah menjadi lebih peka terhadap hak-hak kelompok rentan, minoritas, dan anak-anak. Dalam konteks membangun Forum Desa Inklusif, Yayasan Tifa telah membangun pemahaman masyarakat desa terhadap akses program perlindungan sosial pemerintah (termasuk dana desa) yang inklusif secara sosial serta mekanisme untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.



Profil Organisasi Yayasan Tifa

Tentang Yayasan Tifa
Profil Kepemimpinan
Struktur Yayasan Tifa



Tentang Yayasan Tifa

Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kemitraan strategis (*strategic partnership*) dengan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional yang mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif (*constructive engagement*).

Yayasan Tifa didirikan pada 8 Desember 2000 oleh tiga belas tokoh masyarakat sipil Indonesia, yaitu Hadi Soesastro†, Felia Salim, Daniel Dhakidaet, Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, Bambang Widjodjanto, Tosca Santoso, Riefqi Muna, Debra Yatim, Lukas Luwarso, Budi Santoso, Chusnul Mariyah, dan Smita Notosusanto.

Dalam kinerjanya, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil. Upaya-upaya ini menunjukkan posisi Yayasan Tifa sebagai organisasi mandiri yang terbuka terhadap sinergi dengan kemajemukan para pemangku kepentingan.

Sejak berdiri pada tahun 2000, Yayasan Tifa terus konsisten bergerak merespons isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak masyarakat sipil, termasuk di dalamnya hak asasi manusia untuk masyarakat rentan. Berkat program-program yang dijalankan, baik secara mandiri maupun bersama mitra di berbagai wilayah di Indonesia, Yayasan Tifa dikenal sebagai salah satu aktor penting gerakan masyarakat sipil yang mendorong terciptanya masyarakat terbuka, setara, beragam dan berkeadilan.

Nama Yayasan Tifa diambil dari sebuah alat musik pukul yang berasal dari wilayah timur Indonesia. Tifa, sebagai alat musik di Indonesia timur berfungsi memanggil warga untuk turut serta dalam acara pertemuan atau kegiatan-kegiatan adat. Alat musik ini juga digunakan oleh masyarakat adat untuk menyebarkan pesan damai dan keharmonisan.

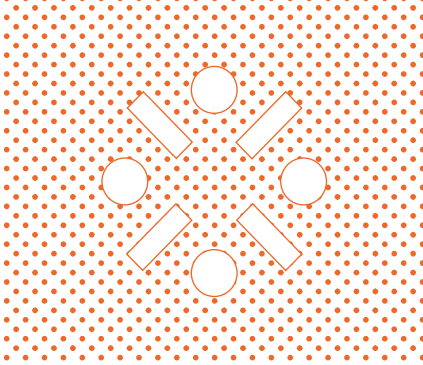
Semangat membangun masyarakat yang damai dan harmonis ini terus dipegang dengan kokoh oleh Yayasan Tifa sejak didirikan pada tahun 2000. Hingga kini, Yayasan Tifa telah bekerja bersama dengan lebih dari 700 organisasi mitra yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melanggengkan semangat tersebut. Dalam memelihara semangat ini, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil.

Selama lebih dari 20 tahun berkiprah, Yayasan Tifa konsisten bergerak merespons isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak warga, termasuk di dalamnya hak asasi manusia kelompok rentan dan marjinal. Yayasan Tifa menyadari bahwa isu-isu tersebut merupakan fundamental bagi terciptanya masyarakat terbuka di Indonesia. Untuk itu, kami akan terus berusaha agar nilai-nilai keadilan dalam isu-isu tersebut ditegakkan dan tetap terjaga keberlanjutannya.

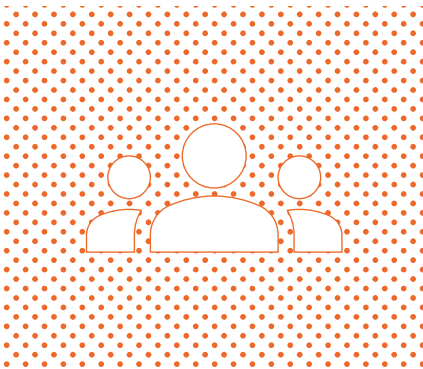
Visi Yayasan Tifa

Terwujudnya masyarakat terbuka yang berkhidmat kepada kebinekaan, kesetaraan, dan keadilan

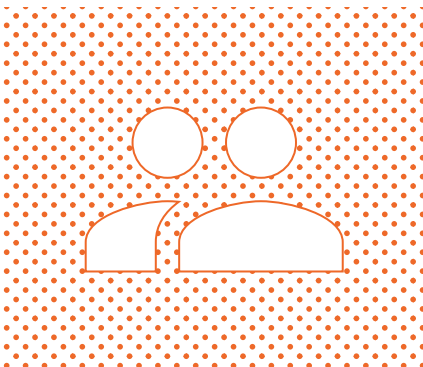
Nilai-nilai Yayasan Tifa



Keterbukaan diartikan sebagai sifat atau kondisi tidak adanya rahasia, apa adanya, bersedia menerima masukan, toleran, dan sejenisnya. Dalam ketatanegaraan, negara terbuka adalah negara yang pemerintahannya tidak menutup diri, transparan, serta terbuka terhadap kritik dan saran pembaruan. Dalam masyarakat terbuka, warga bebas mengemukakan pendapat, ide, kritik, dan pada saat yang sama, warga juga siap menerima masukan untuk perbaikan.



Kebinekaan diartikan sebagai tatanan yang tidak didominasi oleh tata nilai, titik pandang, maupun pola pikir dan sikap suatu kelompok tertentu. Kebinekaan berarti keberagaman diakui dan dihargai dalam sebuah komunitas dan kehidupan publik. Masyarakat yang berkhidmat kepada kebinekaan adalah masyarakat yang bukan hanya mengakui perbedaan, melainkan juga melihat keberagaman (sosial-budaya, agama, ras, pandangan politik, dan lainnya) sebagai suatu aset, nilai tambah, dan kekuatan.



Kesetaraan diartikan sebagai situasi ketika setiap warga memiliki status dan hak yang sama di mata hukum. Masyarakat yang setara berupaya menghapus diskriminasi berbasis gender, agama, sosial-ekonomi, mayoritas-minoritas, elit-nonelit, kaya-miskin dan bentuk ketidaksetaraan lainnya, sehingga setiap individu mendapat perlakuan yang sama dari negara. Termasuk dalam hal ini adalah memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan, mendapatkan pekerjaan serta tempat tinggal yang layak, dan hak dasar lainnya.



Keadilan diartikan sebagai sifat ketidakberpihakan. Negara yang menjunjung keadilan adalah Negara yang memenuhi dan melindungi hak dan kewajiban setiap warganya, serta tidak berperilaku sewenang-wenang terhadap warganya.

Profil Kepemimpinan Yayasan Tifa

Dewan Pengurus



Endy Bayuni

Endy Bayuni adalah Ketua Dewan Pengurus Yayasan Tifa sejak 2021. Beliau juga adalah Advisor to the Board of Editors di the Jakarta Post serta salah satu anggota dari Oversight Board untuk Facebook. Endy telah berkiprah sebagai jurnalis setidaknya selama 39 tahun dan dikenal sebagai jurnalis yang aktif menulis seputar isu politik nasional maupun internasional, *political Islam*, dan media massa di Indonesia.



Ani Soetjipto

Ani Soetjipto merupakan seorang pengajar departemen Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI dan Pasca Sarjana Kajian Gender di Universitas Indonesia. Ani merupakan doktor di bidang hubungan internasional dari Universitas Padjajaran (2017). Di samping mengajar, Ani aktif terlibat dalam menyuarakan isu masyarakat sipil utamanya pemberdayaan perempuan dan isu HAM. Ani melahirkan beberapa karya penulisan, diantaranya Politik Harapan: Politik Perempuan Pasca Reformasi (2011), Suara dari Desa: Menuju Revitalisasi PKK (2013), Transnasionalisme: Peran Aktor Non-Negara dalam Hubungan Internasional (2018), HAM dan Politik Internasional: Sebuah Pengantar (2015).



Jacklevyn Frits Manuputty

Jacklevyn Frits Manuputty adalah sosok pejuang perdamaian umat beragama. Beliau menjadi saksi hidup konflik yang mengatasnamakan agama Islam dan Kristen pada 1999-2002 yang menewaskan lebih dari 10.000 orang dan menginspirasi beliau untuk andil dalam resolusi konflik atas nama agama. Pendeta Jacky adalah pendiri Lembaga Antariman Maluku Aksi Kemanusiaan (LAIM). Berkat upayanya, Pendeta Jacky mendapat beberapa penghargaan diantaranya Maarif Award (2007) dan Tanenbaum Peacemaker in Action Award (2012).



Petrarca Karetji

Petrarca Karetji saat ini menjabat sebagai Kepala Global Pulse Lab PBB Jakarta. Beliau memiliki sederet pengalaman di bidang desain dan manajemen proyek, pemecahan masalah pada pelbagai tema pembangunan sosial, pengembangan jejaring antar-pribadi dan organisasi, serta analisis kelembagaan. Pengalaman tersebut berkembang dari keterlibatan dan perannya pada berbagai lembaga, seperti sektor swasta (IDP Education Australia dan PT Austraining Nusantara), sektor publik (World Bank Multi-Donor Support Office for Eastern Indonesia, AusAID Indonesia Director for Poverty Reduction, Regional Development, and Decentralisation), termasuk juga di perguruan tinggi (Universitas Kristen Satya Wacana). Petrarca turut berkontribusi dalam program yang mendukung penguatan OMS, diantaranya Legal Reform Program, Knowledge Sector Initiative Phase 2, BaKTI, dan Australia Development Cooperation Scholarships.



Dyan Shinto E. Nugroho

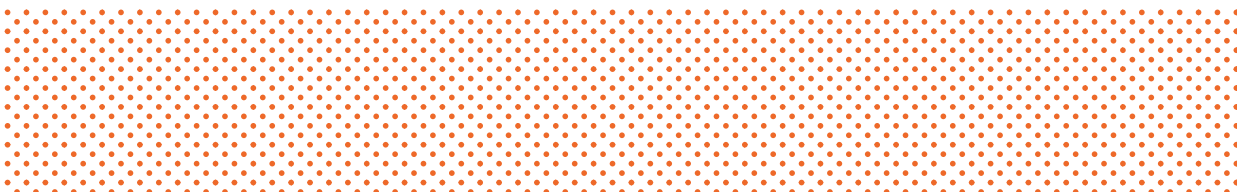
Dyan Shinto Eko Nugroho dikenal sebagai salah satu tokoh di Indonesia yang berperan dalam memajukan bidang teknologi di Indonesia. Shinto saat ini adalah Chief Policy and Government Relations GoTo *holding*. Sebelum berkiprah di GoTo, Shinto merupakan perempuan pertama di jajaran *leadership* Google Indonesia dan merupakan bagian Divisi Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Google Asia Pacific. Sebelum berkarya di ranah privat, Shinto merupakan staf khusus Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif



Shita Laksmi

Shita Laksmi menjadi Direktur Eksekutif Yayasan Tifa sejak November 2019, saat Yayasan Tifa memulai transformasi organisasi. Shita sudah bekerja di sektor pembangunan selama 21 tahun dan merupakan pegiat di isu pengembangan media, transparansi dan akuntabilitas, perlindungan data pribadi, dan tata kelola internet. Shita memperoleh gelar MA Jurnalistik dari Ateneo de Manila University (2004) dan MA Contemporary Diplomacy in Internet Governance di University of Malta (2020). Tahun 2014–2017 Shita adalah anggota Multistakeholder Advisory Group untuk Internet Governance Forum di PBB. Sebelum di Tifa, Shita diantaranya pernah bekerja sebagai Tenaga Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika di Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Diplo Foundation yang berbasis di Jenewa, dan Hivos Asia Tenggara.



Struktur Yayasan Tifa



Untuk mencapai maksud dan tujuannya di bidang sosial kemanusiaan dengan tetap mengutamakan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, Yayasan Tifa sejalan dengan mandat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, memiliki empat organ utama di struktur organisasinya, mencakup pembina, pengawas, pengurus, dan kantor eksekutif.

Badan pembina Yayasan Tifa diketuai oleh Felia Salim dan beranggotakan tiga pendiri organisasi, yaitu Todung Mulya Lubis, Goenawan Mohammad, dan Daniel Dhakidae (almarhum, wafat pada 6 April 2021) sebagai anggota. Pada posisi pengawas terdapat Delima Kiswanti yang memberi arahan dan meninjau kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan Yayasan Tifa. Untuk formasi pengurus Yayasan Tifa, saat ini berperan sebagai ketua Endy Bayuni dengan wakilnya Ani Soetjipto, dengan para anggotanya adalah Jacklevyn Frits Manuputty, Petrarca Karetji, dan Dyan Shinto E. Nugroho

Di Kantor Eksekutif, Yayasan Tifa dipimpin oleh Shita Laksmi sebagai Direktur Eksekutif. Dalam kegiatan Yayasan Tifa sehari-hari, Shita didukung oleh tim manajemen yang terdiri dari Sudaryanto sebagai Senior Program Officer, Nurlia Wuliyanti sebagai Grants Manager, Dennis Tjandra sebagai Finance Manager dan Bernadetha Chelvi Yuliasuti sebagai Office Manager.

Dari sisi program terdapat Zico Mulia sebagai Program Officer Human Rights, selaku Program Officer Data Policy & Governance terdapat Gusti Ayu Meisa Silakarma yang mengisi posisi ini hingga Juni 2021 dan diteruskan oleh Fuji Aotari Wahyu Anggreini dengan dukungan Lamia Putri Damayanti sebagai Program Assitant Data Policy & Governance. Selain itu, terdapat juga Nurma Fitrianingrum sebagai Project Officer for Program Review serta An Nisa Tri Astuti yang bergabung hingga Agustus 2021 dan Intan Fatma Dewi sebagai Program Assistant.

Dalam menjalankan beragam aktivitas dan kegiatan operasionalnya, Yayasan Tifa diperkuat oleh Rully Safriani K. sebagai Program Administrator, Kartika Budhi Wijayanti sebagai Knowledge Management and Communications Officer hingga Januari 2021 dan diteruskan posisinya oleh Tongki Ari Wibowo, Roy Linanda sebagai Finance Officer hingga September 2021 yang kemudian diteruskan posisinya oleh Mars Elyssian R, Supri Hartini sebagai Finance Assistant, dan Harry Rizky sebagai staf Information and Communications Technology (ICT).

Program & Dukungan Yayasan Tifa





*Pelatihan Perempuan Pembela HAM Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat
Foto: Dok. Yayasan Pusaka Bentala Rakyat untuk Yayasan Tifa*

YAYASAN TIFA

Menyambut Tantangan Masa Depan Teknologi Informasi dan Komunikasi



Peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendorong demokrasi dan masyarakat yang terbuka di Indonesia tidak hanya terbatas pada pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi. Di era keterbukaan saat ini, TIK memiliki peran yang lebih besar untuk mendukung dan mendorong pemberdayaan masyarakat melalui platform daring, seperti media sosial yang telah terbukti banyak digunakan dalam berbagai gerakan kemasyarakatan.

Yayasan Tifa sebagai lembaga yang bertumpu pada kerja sama yang kolaboratif dan konstruktif menyadari pentingnya peran TIK dalam diseminasi informasi dan menciptakan mekanisme baru untuk berkomunikasi antar individu atau antar institusi. Namun, dalam perkembangannya bidang TIK di Indonesia masih menyimpan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pemanfaatannya bisa berjalan optimal. Terdapat setidaknya tiga program yang dijalankan oleh Yayasan Tifa dalam rangka menghadapi tantangan modern di bidang ini,

masing-masing berfokus di bidang tata kelola data sektor kesehatan dan pendidikan, perlindungan data pribadi, dan penguatan ekosistem data digital.

Mendorong Tata Kelola Data yang Produktif di Sektor Kesehatan dan Pendidikan

Pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri telah menjadi pendorong bagi transformasi digital pada layanan publik di Indonesia. Lebih lanjut, transformasi ini juga membuat kita mengakui akan pentingnya data untuk mendukung kinerja sektor publik. Menanggapi kondisi ini, Yayasan Tifa bersama dengan Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) mengimplementasikan program “Tata Kelola Data di Sektor Kesehatan dan Pendidikan Selama Pandemi Covid-19 dan Dampaknya terhadap Pelayanan Publik”. Kedua sektor tersebut merupakan sektor utama pelayanan publik yang terguncang akibat dampak pandemi serta dianggap memerlukan data yang reliabel agar transformasi digitalnya dapat berjalan dengan baik.

Pada implementasinya, program ini terbagi menjadi dua aktivitas utama, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh CIPG, dan advokasi serta dialog dengan pemangku kepentingan yang dijalankan oleh Yayasan Tifa. Dalam penelitian yang dilakukan, CIPG fokus pada lima isu yang mencakup pelacakan kontak, beban fasilitas layanan kesehatan, vaksinasi, bantuan kuota internet untuk pembelajaran jarak jauh, dan pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Paralel dengan kegiatan penelitian, kegiatan advokasi juga dilaksanakan oleh Yayasan Tifa dengan tujuan mendorong para pemangku kepentingan mengupayakan reformasi pada tata kelola data yang lebih baik serta meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk sektor kesehatan dan pendidikan.

Dari sisi penelitian, walau sempat terkendala implementasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah di beberapa daerah, pada 2021 CIPG telah berhasil menuntaskan kegiatan pengambilan data di lapangan. Pengambilan data ini dilakukan di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat dan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, hasil pengambilan data ini akan diolah, disajikan, dan didiskusikan bersama dengan pemerintah, kelompok masyarakat sipil, dan komunitas untuk menjadi bekal penanganan pandemi

nasional. Sementara itu, dari sisi advokasi, selama program ini berjalan telah terselenggara beberapa pertemuan bilateral dengan dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kota Pontianak. Pada tahap selanjutnya, setelah ada keluaran penelitian yang dihasilkan, nantinya proses advokasi akan dilanjutkan dengan menggandeng para pemangku kepentingan yang lebih luas dari masing-masing daerah yang menjadi lokus program.

Memperjuangkan Pelindungan Data Pribadi yang Sederhana dan Bermakna di Indonesia

Seiring adopsi teknologi informasi dan komunikasi yang kian luas di Indonesia, pengaturan pelindungan data pribadi (PDP) menjadi sebuah kebutuhan guna menyeimbangkan aspek perkembangan inovasi dan ekonomi dengan pentingnya menjaga privasi dan data pribadi masyarakat. Upaya membangun ekosistem ekonomi digital yang terpercaya dan berkesinambungan perlu didukung dengan adanya pengaturan prinsip dan mekanisme implementasi Undang-undang (UU) PDP yang merujuk pada standar internasional, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa.

Pada tahun 2020, Yayasan Tifa telah melakukan riset mengenai komparasi PDP dengan instrumen pelindungan data pribadi internasional. Berbekal riset ini, Yayasan Tifa aktif memberi masukan terkait pengaturan hak subyek data yang tertuang baik dalam undang-undang maupun dalam mekanisme kelembagaan otoritas data pribadi. Dalam rangka melanjutkan upaya memperjuangkan terwujudnya pelindungan data pribadi yang bermakna di Indonesia, Yayasan Tifa bekerja sama dengan Meta (sebelumnya Facebook) pada tahun 2021 menyelenggarakan serangkaian diskusi terfokus untuk menjembatani dialog terkait kebutuhan beserta tantangan-tantangan yang menyertai upaya mewujudkan pelindungan data pribadi yang di Indonesia. Dalam perkembangannya, telah terselenggara empat sesi diskusi terfokus yang melibatkan beragam pemangku kepentingan yang mencakup penyelenggara platform digital, perwakilan masyarakat sipil, akademisi, dan perwakilan lembaga pemerintahan.



Diskusi-diskusi tersebut membuahkan dua dokumen *policy brief*, yang pertama membahas tantangan dan kebutuhan akan instrumen perlindungan data pribadi dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan di atas. Sementara itu, *policy brief* yang kedua lebih khusus menjabarkan tantangan dan kebutuhan dari Kementerian dan Lembaga Pemerintahan di Indonesia dalam pengaturan dan implementasi RUU PDP beserta peraturan turunannya kelak. Kedua *policy brief* ini dapat diakses secara bebas melalui situs web Yayasan Tifa di tifafoundation.id.

Perjalanan aktivitas advokasi ini tidak luput dari tantangan dinamika proses pengesahan RUU PDP di DPR yang masih berjalan hingga penulisan laporan ini dilakukan. Namun demikian, di samping dinamika tersebut, hubungan yang konstruktif antara Yayasan Tifa dengan para pengambil keputusan, baik di kalangan pemerintahan ataupun di DPR tetap terjalin. Hal ini dilandasi oleh semangat bahwa rekomendasi-rekomendasi yang dihasilkan dari diskusi dan pembelajaran yang dilakukan adalah sebuah kebutuhan bersama. Tidak hanya dengan pemerintah, dalam advokasi RUU PDP yang dilakukan, Yayasan Tifa juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lain dalam wadah Koalisi Advokasi RUU PDP untuk memperjuangkan tata kelola data pribadi yang demokratis dan berkeadilan.

Memperkuat Ekosistem Data Digital

Di akhir tahun 2021, Yayasan Tifa memulai proses menjalankan program memperkuat ekosistem data digital di Indonesia. Pada program yang akan berjalan selama 24 bulan hingga November 2023 ini, Yayasan Tifa bersama LBH Pers selaku mitra penyelenggara dengan dukungan The David and Lucile Packard Foundation telah mulai merumuskan akan kebutuhan riset mengenai aktivisme digital dalam cakupan ekosistem data digital. Riset ini nantinya akan berupaya menanggapi berbagai peluang dan tantangan yang muncul seiring dengan tumbuhnya aktivisme digital, khususnya pada kaum muda dan organisasi masyarakat sipil di Indonesia.

Melalui riset yang rencananya akan mulai dilakukan pada tahun 2022 ini, Yayasan Tifa ingin memotret signifikansi aktivisme digital dalam pergerakan aksi

sosial politik akar rumput. Seiring semakin masifnya praktik aktivisme digital yang muncul di akar rumput, Yayasan Tifa memandang perlu memahami lebih jauh bagaimana literasi digital telah terbangun di kalangan ini. Termasuk dalam literasi yang ingin diketahui tersebut adalah bagaimana pemanfaatan aktivisme digital dalam proses-proses advokasi, platform dan saluran digital apa saja yang digunakan, serta peningkatan apa yang dibutuhkan terkait media digital yang digunakan.

Berdasar kerja-kerja dalam bidang TIK yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang patut menjadi catatan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pertama, isu TIK sendiri masih relatif baru digeluti oleh Yayasan Tifa, hal ini berakibat pada diperlukannya waktu tambahan untuk menjalani kurva pembelajaran bagi para staf yang terlibat. Selain itu, belum ada *best practice* yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program juga menjadi tantangan tersendiri yang mengiringi kebaruan ini. Kondisi ini menyebabkan Yayasan Tifa perlu melakukan eksplorasi dan mesti melalui berbagai *trial and error* untuk menemukan formula cara kerja program yang tepat.

Terlepas dari tantangan-tantangan yang harus dihadapi, lewat pelaksanaan program-program dalam bidang TIK ini disadari bahwa Yayasan Tifa mempunyai jejaring dan modal sosial yang kuat, tidak hanya dengan sesama organisasi masyarakat sipil dan pemerintah, tetapi juga dengan sektor privat yang terlibat. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan dari perwakilan-perwakilan beragam pemangku kepentingan yang diundang dalam sesi-sesi diskusi yang dilakukan. Kuatnya modal sosial dan semakin matangnya kapasitas Yayasan Tifa dalam mengawal isu ini dapat menjadi bahan bakar bagi kegiatan-kegiatan advokasi untuk memperkuat peran TIK dalam peningkatan akses informasi serta mendorong partisipasi dan transparansi yang berujung pada pemajuan demokrasi di Indonesia pada masa yang akan datang.

YAYASAN TIFA

Mendorong Program Pembangunan yang Efisien, Transparan, dan Akuntabel Lewat Partisipasi Aktif Masyarakat

Pada tahun 2021, Yayasan Tifa melanjutkan kerja sama yang telah dimulai pada tahun sebelumnya dengan Japan Initiative dalam mengkaji dan menyusun pendekatan evaluasi program berbasis masyarakat dengan mengadopsi “Program Review” dari Jepang. Sebagai catatan, konsep Program Review sendiri telah diimplementasikan di Jepang sejak tahun 2002 sebagai upaya penghematan anggaran lewat seleksi program-program pemerintah yang dijalankan. Dalam perkembangannya, Program Review ini tumbuh menjadi sebuah pendekatan evaluasi pembangunan yang diadopsi lebih luas oleh berbagai tingkat pemerintahan secara nasional. Dalam perkembangannya, mekanisme Program Review ini tidak hanya mampu menghemat anggaran, tetapi juga telah meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat atas program-program pembangunan yang berdampak terhadap kehidupan mereka.

Menindaklanjuti diskusi dengan beragam pemangku kepentingan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, proses pengenalan Program Review kepada masyarakat Indonesia yang lebih luas kembali

diteruskan di tahun 2021. Upaya pengenalan ini dilakukan lewat beberapa kegiatan yang mencakup penulisan buku tentang praktik serta ruang bagi pelaksanaan program review di Indonesia, pembuatan video animasi yang menjelaskan latar belakang dan manfaat dilaksanakannya Program Review, dan penyelenggaraan webinar yang membahas kiat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas program pembangunan. Ketiga kegiatan ini berjalan pada periode Januari hingga Juni 2021.

Menempatkan Desa sebagai Fokus Kegiatan

Setelah upaya pengenalan kepada publik berjalan dengan baik pada semester pertama 2021, selanjutnya kegiatan-kegiatan “Program Review” masuk pada fase pelaksanaan. Melalui pertimbangan yang didapat dari serangkaian diskusi dengan Japan Initiative dan berbagai pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, dan Sekretariat Open Government Indonesia di BAPPENAS, Yayasan Tifa memutuskan untuk melaksanakan uji coba atau proyek percontohan Program Review di tingkat desa.

Pertimbangan yang mendasari keputusan ini antara lain adalah adanya kedekatan atau hubungan yang erat antara pemerintah desa dengan warga. Selain itu, pada tataran desa, sebagian besar warga juga mengetahui, terlibat, atau bahkan menjadi penerima manfaat langsung dalam program-program pembangunan yang diselenggarakan pemerintah desa. Dengan kedekatan ini, warga desa dianggap dapat memberikan penilaian atau evaluasi terhadap program-program pembangunan yang berjalan di lingkungannya.

Selain faktor kedekatan, siklus program juga menjadi pertimbangan yang diperhitungkan. Dibanding pemerintah daerah atau nasional, pemerintah desa memiliki siklus perencanaan yang relatif pendek. Di samping memiliki siklus perencanaan yang lebih pendek, pemerintah di tingkat desa juga mempunyai otoritas dalam merencanakan program dan penggunaan anggaran yang dimilikinya. Kondisi ini membuat hasil Program Review nantinya dapat diimplementasikan dalam rencana program dan anggaran tahun berikutnya tanpa banyak penundaan, hambatan birokrasi, ataupun intervensi dari otoritas yang lebih tinggi.

Pemilihan desa sebagai lokasi pelaksanaan Program Review dilakukan melalui diskusi dan konsultasi antara Yayasan Tifa, Japan Initiatives, dan Atmawidya Alterasi Indonesia (Alterasi), organisasi lokal yang menjadi mitra implementasi. Berdasar komitmen pemerintah desa yang ditunjukkan, riwayat kerja sama, serta hubungan yang telah terjalin antara mitra implementasi dengan pemerintah desa yang ada, diputuskan uji coba dilakukan di Desa Sriharjo dan Guwosari, Yogyakarta.

Selama fase pelaksanaan dari Juli hingga Desember 2021, Yayasan Tifa bersama Japan Initiative dan Alterasi telah menyelenggarakan dua lokakarya di setiap desa tersebut, dengan masing-masing lokakarya menasar aparatur pemerintah desa dan warganya. Lokakarya yang menasar aparatur desa berfokus pada pengenalan praktik Program Review yang berjalan di Jepang. Sesi lokakarya ini juga menjadi sarana berbagi pengalaman bagi pemerintah desa tentang praktik evaluasi program yang mereka lakukan. Tidak hanya pemerintah desa, pelatihan

Pelatihan Program Review di Yogyakarta
Foto: Dok. Yayasan Tifa





ini juga mengundang perwakilan pemerintah kabupaten sebagai peserta dengan harapan dapat memperkenalkan Program Review lebih lanjut kepada pemerintah di tingkat kabupaten. Selain itu, pendamping desa dari masing-masing desa juga diundang agar upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya evaluasi program pembangunan lewat praktik Program Review kepada pemangku kepentingan yang lebih luas dapat tersampaikan.

Melengkapi lokakarya untuk aparaturnya pemerintah desa, pada lokakarya yang menyasar warga desa, materi yang disampaikan berfokus pada tata cara pelaksanaan Program Review. Pada sesi ini, Yayasan Tifa dan Alterasi mengundang sekitar 30 orang di setiap desa untuk mengikuti pelatihan. Dari 30 undangan yang dibagikan, 15 di antaranya ditujukan bagi perwakilan dari berbagai organisasi dan kelompok masyarakat yang ada di desa, sementara 15 lainnya merupakan undangan terbuka bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi. Komposisi peserta ini dirancang untuk memastikan agar setidaknya setengah dari peserta pelatihan merupakan warga yang aktif. Adanya undangan terbuka dalam lokakarya ini juga bertujuan untuk membuka ruang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengikuti pelatihan dan mempelajari Program Review lebih lanjut.

Mengurai Tantangan dalam Menyiapkan Program yang Berkelanjutan

Sama seperti program-program lain yang berlangsung pada tahun 2021, kegiatan pengenalan dan implementasi “Program Review” di lapangan juga menghadapi tantangan berupa pandemi Covid-19 yang belum usai beserta segala ketidakpastian yang menyertainya. Terlebih, gelombang varian delta yang melanda Indonesia pada Juli hingga September 2021 telah mendorong munculnya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk membatasi rantai penyebaran virus. PPKM yang dicanangkan pemerintah Indonesia ini menyebabkan Yayasan Tifa mesti menunda serta mengubah format penyelenggaraan aktivitas-aktivitas terkait Program Review dari yang sebelumnya direncanakan berjalan secara tatap muka menjadi virtual.

Kegiatan-kegiatan yang terkena dampak dari pembatasan ini antara lain adalah penilaian langsung mitra desa dan pengenalan Program Review kepada pemangku kepentingan lokal. Aktivitas lain yang juga tertunda akibat adanya pembatasan adalah kunjungan para pemangku kepentingan dari Indonesia, termasuk perwakilan desa mitra, ke Jepang. Kunjungan ini awalnya direncanakan agar para pemangku kepentingan terkait dapat melihat dan mempelajari secara langsung implementasi Program Review di negara asalnya.

Selain keterbatasan akibat pandemi, komposisi gender yang seimbang dalam inisiasi Program Review juga menjadi tantangan yang diperhatikan. Pada lokakarya awal untuk warga, sempat ditemukan jumlah peserta perempuan yang dominan. Setelah ditelusuri, hal ini terjadi karena pelatihan dilakukan di hari kerja dan banyak laki-laki yang tidak bisa mengikuti kegiatan ini karena terikat dengan komitmen pekerjaannya. Melihat kondisi ini, agar tercapai keseimbangan komposisi peserta laki-laki dan perempuan, pelatihan atau lokakarya warga selanjutnya diputuskan untuk diselenggarakan pada akhir pekan dan menyediakan beberapa undangan yang spesifik ditujukan untuk laki-laki di desa percontohan.

Terlepas beragam tantangan di atas, terdapat beberapa pembelajaran yang dipetik dari proses pengenalan dan implementasi Program Review yang telah dijalankan. Salah satunya pembelajaran tersebut adalah mengenai potensi melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Program Review sebagai panitia pelaksana. Di Jepang, Program Review memang diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai lembaga eksekutif, namun dalam inisiasi di Indonesia yang berlangsung di tingkat desa, atas usulan warga, keterlibatan BPD selaku lembaga legislatif pemerintah desa dilihat mampu memberi manfaat dalam Program Review. Bagi BPD, Program Review bisa menjadi metode untuk menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam memantau dan mengevaluasi program-program pemerintah desa.


Dengan melibatkan BPD, Program Review akan dapat berjalan lebih optimal, inklusif, dan menghargai

pembagian peran antarpemangku kepentingan di tingkat desa. Nantinya, BPD sebagai panitia pelaksana juga akan berperan dalam memastikan keberlanjutan implementasi Program Review, sehingga pemerintah desa dapat mengadopsi dan menginisiasi Program Review secara mandiri di masa yang akan datang. Pelibatan BPD ini juga menunjukkan bahwa Yayasan Tifa dan Japan Initiative membuka pintu terhadap masukan dan mengapresiasi usulan-usulan warga mengenai implementasi Program Review. Dengan kata lain, dalam pengembangan Program Review di Indonesia, masih terdapat ruang penyesuaian dengan konteks lokal, dalam hal ini adalah tata pemerintahan dan struktur administrasi di tingkat desa yang sudah ada.

Melihat vitalnya peran warga serta antusiasme mereka dalam inisiasi Program Review, ke depan pelatihan dan edukasi lebih lanjut mengenai hak partisipasi publik dalam proses perencanaan dan penganggaran desa juga akan dipertimbangkan untuk dilaksanakan. Pelatihan dan edukasi ini dilakukan supaya warga kian berdaya untuk mendorong pemerintah menindaklanjuti hasil Program Review dan meneruskan praktik Program Review setelah masa berjalan proyek percontohannya selesai. Pada akhirnya, dengan semakin berdayanya warga, partisipasi mereka dalam kegiatan atau program-program pembangunan akan semakin signifikan dan dengan kapasitasnya akan mampu mengawal program-program tersebut agar berjalan efektif serta tepat sasaran.

YAYASAN TIFA

Memperjuangkan Upaya Perlindungan Hak-hak Kelompok Rentan

 Selama pandemi, pemerintah telah berupaya memenuhi hak atas jaminan sosial dan standar hidup minimum masyarakat melalui program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan BLT Dana Desa. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat miskin dan rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan disabilitas, yang belum menikmati hak-hak tersebut antara lain karena minimnya informasi serta proses yang masih perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabilitasnya. Padahal, terpenuhinya hak ekonomi dan sosial masyarakat melalui program perlindungan sosial yang transparan sangat penting, terutama pada masa-masa pandemi ini.

Kondisi di atas menunjukkan belum terbentuknya mekanisme tata kelola data yang reliabel dan akuntabel, khususnya di masa-masa awal pandemi. Ketidaksiapan ini berdampak pada lemahnya kemampuan masyarakat untuk menyusun strategi mitigasi mandiri di tingkat lokal. Lemahnya strategi mitigasi ini lebih lanjut telah memunculkan efek domino yang semakin mengekspos masyarakat,

khususnya mereka yang berpenghasilan rendah, rentan, dan terpinggirkan, terhadap ketimpangan, ancaman-ancaman diskriminasi, dan tindak terpenuhinya hak asasi.

Untuk itu, sebagai upaya menciptakan mekanisme yang lebih baik dalam melindungi dan mempromosikan Hak Asasi Manusia (HAM) kelompok rentan di masa pandemi, Yayasan Tifa bersama Save The Children dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dengan dukungan Uni Eropa, menjalankan program HEAL: Mempromosikan Hak Asasi Manusia dan Kestaraan untuk Mewujudkan Keberlanjutan. Program ini merupakan bagian dari upaya merespons dampak negatif pandemi Covid-19, khususnya pada perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan yang secara khusus dijalankan di dua provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua provinsi ini dipilih berdasarkan kombinasi beberapa kriteria, yaitu jumlah masyarakat prasejahtera, tren kasus infeksi Covid-19 yang tinggi atau meningkat, serta keberadaan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.

Pelatihan HAM dan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan pada Masa Pandemi COVID-19 di Nusa Tenggara Barat
Foto: Dok. Yayasan Tifa



Termasuk di dalam kategori masyarakat rentan dan terpinggirkan di sini adalah pemeluk agama atau kepercayaan minoritas, masyarakat adat, buruh migran, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta masyarakat dengan orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender yang beragam.

Memperkuat Upaya Perlindungan Sosial

Sejak sebelum pandemi, kelompok-kelompok rentan di atas telah akrab dengan diskriminasi dan ketimpangan. Agar kondisi ini tidak semakin parah selama pandemi, dibutuhkan langkah-langkah khusus dan mekanisme perlindungan untuk menjamin kelompok-kelompok ini terlindungi dan terpenuhi hak-hak sosial dan ekonominya. Yayasan Tifa dalam Program HEAL melaksanakan studi awal untuk memetakan dan mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi beserta dampaknya terhadap kelompok rentan, terutama anak-anak.

Dari studi yang dilakukan, ditemukan perubahan situasi dan perilaku anak-anak di kedua daerah fokus kerja Program HEAL selama pandemi. Perubahan tersebut antara lain mencakup kondisi anak yang cenderung menjadi lebih bingung, sedih, dan jenuh

karena aktivitasnya terbatas. Tidak hanya itu, kerentanan anak di masa pandemi di dua daerah tersebut juga tercermin melalui angka putus sekolah dan perkawinan anak yang terekam dalam penelitian. Pada kasus-kasus putus sekolah, ditemukan beragam latar belakang yang menjadi alasan, seperti tidak adanya biaya, anak yang memilih membantu orang tua untuk bekerja, serta tidak adanya gawai yang mendukung untuk mengikuti pembelajaran daring.

Temuan-temuan dari studi tersebut disampaikan kepada pemerintah desa untuk menjadi masukan perbaikan mekanisme pemberian bantuan yang inklusif kepada masyarakatnya, khususnya anak-anak. Selain itu, hasil penelitian ini juga disampaikan kepada khalayak yang lebih luas pada sesi diskusi “Kolaborasi Multipihak untuk Perlindungan Anak yang Inklusif dan Tangguh Pada Masa Pandemi” dalam Festival HAM 2021 untuk menjadi pembelajaran bersama dalam melindungi hak sesama.

Menindaklanjuti studi yang telah dilakukan, rangkaian Program HEAL dilanjutkan dengan Pelatihan HAM dan Perlindungan Sosial Kelompok Rentan pada Masa Pandemi Covid-19 di Jawa Timur Nusa Tenggara Barat untuk memperkaya

pengetahuan warga dan pemerintah desa mengenai HAM dan perlindungan sosial. Pelatihan ini menghadirkan pemangku kepentingan strategis di tingkat lokal sebagai peserta, yaitu perangkat desa dan kelompok rentan yang mencakup perempuan, disabilitas, minoritas agama dan keyakinan, dan buruh migran.

Pelatihan ini dalam pelaksanaannya mendapat sambutan yang baik dan mampu memantik partisipasi khususnya dari para peserta perempuan dan difabel yang terlibat. Mereka tidak hanya berinteraksi secara aktif selama kegiatan pelatihan, tetapi juga menawarkan gagasan bagi pemerintah di wilayahnya terkait perlindungan HAM kelompok rentan. Dengan hadirnya berbagai elemen masyarakat dalam kegiatan pelatihan ini diharap bisa memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan dan pemenuhan HAM kelompok rentan.

Harmonisasi Hubungan untuk Menjamin Berlangsungnya Perlindungan

Aktivitas studi dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka Program HEAL di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat dapat dikatakan cukup intensif dan padat. Akibatnya, butuh pengawalan yang konsisten agar rangkaian program berjalan sesuai rencana dan keterlibatan para pemangku kepentingan di tingkat lokal tetap terjaga. Namun di sisi lain, belum redanya pandemi juga membatasi mobilitas Yayasan Tifa dalam merangkul dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan lokal. Untuk menyasati kondisi ini, Yayasan Tifa merekrut *Community Organizer* di Provinsi Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai perpanjangan tangan untuk melakukan koordinasi di tingkat daerah serta membantu proses persiapan dan pelaksanaan program HEAL di kedua provinsi tersebut.

Dari sisi internal, sebagai sebuah program yang dilaksanakan bersama dengan lembaga lain, manajemen pembagian tanggung jawab juga menjadi hal yang harus diperhatikan, terlebih ketika terdapat beberapa kegiatan yang berjalan


secara simultan. Pada situasi ini, koordinasi dan komunikasi antarorganisasi menjadi hal yang krusial. Perlu ada sarana komunikasi untuk berbagi informasi mengenai kegiatan yang akan dilakukan ataupun kendala dan bantuan yang bisa diberikan. Komunikasi ini dapat terjalin melalui rapat dan forum formal maupun lewat saluran pesan singkat antarkomponen aktivitas.

Secara eksternal, selain pandemi tantangan lain yang juga dihadapi dalam pelaksanaan Program HEAL di lapangan adalah resistensi pemerintah desa dalam mengakui adanya masyarakat pemeluk agama dan kepercayaan minoritas di daerahnya. Resistensi ini menyebabkan tim lapangan sukar memperoleh izin untuk melakukan studi dan fasilitasi pada kelompok masyarakat tersebut. Sebagai pembelajaran bagi Yayasan Tifa, selanjutnya dalam upaya menyentuh kelompok-kelompok rentan di tingkat tapak perlu pendekatan dengan pemangku kepentingan yang lebih luas, tidak hanya sebatas dengan pemerintah desa namun juga dengan tingkat-tingkat pemerintah di atasnya. Melihat resistensi ini, persuasi dengan pihak pemerintah desa di masa yang akan datang juga perlu dilakukan dengan lebih hati-hati, terutama dalam mendorong agar program perlindungan sosial pemerintah menjadi terbuka dan bersifat lebih inklusif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Pola-pola pendekatan dan komunikasi ini perlu dilakukan agar tercipta hubungan yang harmonis dengan pemerintah desa serta untuk menjamin keselamatan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Yayasan Tifa lewat Program HEAL yang masih berlanjut di tahun 2022 nanti, akan melanjutkan komitmen dalam memperkuat serta mendorong kebijakan dan layanan publik yang lebih akuntabel, inklusif, dan non-diskriminatif. Melalui program ini juga, Yayasan Tifa akan terus memberdayakan pembela HAM dengan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan agar mampu mendokumentasikan implementasi pemenuhan HAM secara memadai dan menawarkan solusi, sehingga pembela HAM dapat dipandang sebagai sekutu oleh masyarakat dalam melindungi dan meningkatkan resiliensi kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan.

IKATAN ORANG HILANG INDONESIA (IKOHI)

Mendorong Pembentukan KKR Nasional sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu di Indonesia



Mengutip Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) harus ditelusuri kembali untuk mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan, dan membentuk budaya menghargai hak asasi manusia sehingga dapat diwujudkan rekonsiliasi dan persatuan nasional. Lebih lanjut, pengungkapan kebenaran juga demi kepentingan para korban dan/atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan/atau rehabilitasi.

Secara garis besar, pembentukan KKR ini memiliki peran yang signifikan pada penegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan di Indonesia, yang sudah semestinya diterapkan secara konsisten dan bertanggungjawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia

Urgensi Menegakkan HAM Melalui Pembentukan KKR

KKR adalah sebuah lembaga ekstra-yudisial yang memiliki tugas menegakkan kebenaran melalui pengungkapan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau, dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa. Mengingat pentingnya lembaga ini, serta masih adanya kasus-kasus HAM yang perlu ditegakkan keadilannya, IKOHI (Ikatan Orang Hilang Indonesia) dengan dukungan Yayasan Tifa berupaya membangun konsolidasi yang sinergis dalam proses advokasi KKR bersama organisasi masyarakat sipil dan komunitas korban dalam mengawal kebijakan KKR pada skala nasional dan lokal, khususnya di wilayah Aceh dan Papua. Upaya konsolidasi ini sejalan dengan semangat Yayasan Tifa dalam pengarusutamaan HAM dan akses terhadap keadilan di Indonesia.

IKOHI sendiri merupakan organisasi yang dibentuk oleh keluarga korban penghilangan paksa 1997/1998. Dengan visi terwujudnya persatuan, solidaritas dan keadilan bagi korban pelanggaran HAM guna menciptakan masyarakat adil dan demokratis, kerja IKOHI berfokus pada mendorong pemulihan korban. Dalam pemulihan tersebut, IKOHI menitikberatkan pada beberapa aspek krusial yang mencakup penguatan psikososial, pemberdayaan ekonomi, serta advokasi kebijakan pertanggungjawaban negara untuk mendorong dilakukannya penyelesaian kasus secara adil bagi korban dan keluarganya.

Bersama Tifa, IKOHI menyelenggarakan program konsolidasi yang bertajuk “Mendorong Kebijakan Pemerintah (Presiden) Bagi Pembentukan KKR Nasional Sebagai Upaya Penyelesaian Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu”. Program ini telah berjalan mulai bulan Juli tahun 2020 hingga April 2021 di beberapa daerah yang mencakup Provinsi DKI Jakarta, Nanggroe Aceh Darussalan, Papua, dan Papua Barat. Upaya pembentukan KKR yang menjadi pokok program ini telah didorong melalui beberapa aktivitas utama, termasuk di dalamnya adalah diskusi terfokus dengan masyarakat sipil dan korban, diskusi publik, pertemuan dengan pihak pemerintah, monitoring dan evaluasi, hingga kampanye melalui media audio dan visual.



Dalam menjalankan kegiatan advokasi KKR yang direncanakan, IKOHI melakukannya melalui dua pendekatan. Pertama adalah membangun komunikasi intensif dengan berbagai elemen masyarakat sipil (organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh publik, dan pakar) yang bergerak dalam isu penyelesaian pelanggaran berat HAM. Upaya membangun komunikasi ini dilakukan melalui forum-forum rapat dan pertemuan membangun kesepahaman atau konsensus bahwa UU KKR adalah pilihan yang paling terjangkau untuk diwujudkan.

Pendekatan kedua adalah melakukan dialog dengan lembaga negara dan kementerian yang memiliki tugas dan tanggung jawab terkait pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM. Dialog konstruktif ini bertujuan untuk mendorong kesepakatan bersama atas rumusan kebijakan untuk KKR dan reparasi korban. Secara garis besar, kedua pendekatan ini dilakukan untuk membangun diskursus publik yang mengamplifikasi pentingnya agenda pengungkapan kebenaran sebagai langkah awal, sebelum nantinya beranjak pada agenda yang lebih besar, yaitu pengakuan dan pemulihan terhadap korban.

Peluang dan Tantangan Implementasi KKR di Aceh dan Papua

Dalam diskusi terfokus yang diselenggarakan untuk memetik pembelajaran dari KKR Aceh yang sudah berjalan, disimpulkan bahwa masyarakat sipil

bersama korban perlu mengajukan kembali kebijakan atau payung hukum pembentukan KKR berdasarkan prinsip dan standar HAM, baik melalui mekanisme undang-undang ataupun lewat peraturan presiden. Adanya KKR di tingkat nasional diproyeksikan menjadi penguat bagi posisi dan peran KKR Aceh yang sudah berjalan saat ini.

Diskusi mengenai perjalanan KKR Aceh telah membuka berbagai inisiatif bagi upaya pengakuan dan pemulihan korban. Resistensi yang dibayangkan akan muncul dari pihak pelaku ternyata tidak terlalu signifikan. Dalam perjalanannya, diskusi perjalanan KKR Aceh berkembang menjadi diskursus yang mengarah kepada upaya pembangunan kembali (restorasi) sosial pasca konflik di masa lalu. Satu hal yang menjadi ganjalan bagi KKR Aceh adalah belum adanya payung KKR nasional. Hal ini menjadi kendala dan kerumitan tersendiri dalam penganggaran kelembagaan di birokrasi pemerintah Aceh, karena masih dibutuhkannya dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dalam operasional KKR Aceh.

Sementara itu, dalam pembahasan mengenai KKR di Papua diyakini bahwa tantangannya masih cukup kompleks. Adanya konflik yang berjalan, kekerasan yang masih terekskalasi, status sejarah Papua, dan ketidakpercayaan menjadi faktor-faktor pembedanya. Untuk itu, perlu komitmen yang serius dari pemerintah pusat untuk mewujudkan KKR di Papua. Komitmen ini penting karena selain kompleksitas yang telah disinggung sebelumnya, pembentukan KKR untuk Papua juga perlu melihat Papua dalam kerangka undang-undang otonomi khusus.

Membangun Gerakan Kolektif

Seluruh aktivitas dalam program mendorong KKR Nasional ini berjalan dalam situasi pandemi Covid-19. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas diskusi dan advokasi, terutama karena pendekatan pada pihak-pihak pemerintahan dan parlemen dirasa tidak cukup melalui pertemuan-pertemuan resmi. Dalam proses advokasi ini IKOHI menyadari perlunya ruang-ruang pertemuan informal untuk membahas lebih lanjut berbagai kendala proses pembahasan di pemerintahan maupun pemasukan legislasi

KKR di parlemen. Kendala ini disiasati dengan melangsungkan beragam diskusi virtual, yang walaupun tidak sempurna, telah menjadi alternatif yang dapat mengakomodasi partisipan lebih banyak, sehingga kegiatan berjalan lebih transparan bagi seluruh jaringan kerja advokasi.


Lewat program ini telah terjadi proses dialog dan diskusi yang konstruktif antar jaringan kerja advokasi KKR. Hal ini dibuktikan dengan terbukanya pihak-pihak yang terlibat terhadap pandangan, pendapat, dan kritik atas proses perjalanan advokasi KKR yang disampaikan pada forum-forum dalam program. Dalam proses advokasi ini juga muncul kesadaran bersama bahwa perjalanan reformasi selama dua dekade ke belakang masih belum memenuhi harapan, terutama dalam hal penyelesaian peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu.

Munculnya kesadaran kolektif ini berdampak pada berkurangnya ego kelembagaan, dan kembali menekankan pentingnya berfokus pada isu pengadilan HAM, kebenaran, dan upaya-upaya pemulihan korban. Gagasan dan inisiatif yang diambil oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses advokasi ini sebagai agenda yang saling melengkapi, tidak lagi sebagai persaingan agenda advokasi.

Berdasar pembelajaran-pembelajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa KKR masih relevan untuk diperjuangkan. Agar program advokasi KKR dapat berkesinambungan, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berkonsolidasi, menghasilkan konsensus, dan mengawal implementasi program ini. Dengan demikian, diskusi multipihak yang terbuka antara komunitas korban, pembela HAM, dan para pihak yang akan dilibatkan dalam upaya advokasi KKR diharap bisa terbangun.

JARINGAN KERJA RAKYAT (JERAT) PAPUA

Upaya Membuka Gerbang Keadilan di Tanah Papua

 **P**emenuhan hak asasi manusia (HAM) adalah persoalan fundamental yang masih memerlukan perhatian dan pengawalan yang serius. Permasalahan terkait pemenuhan HAM di Papua khususnya, memiliki dimensi konflik yang kompleks, mencakup konflik vertikal antara orang asli Papua dengan pemerintah, hingga konflik horizontal antar kelompok masyarakat. Isu ini menjadi semakin rumit karena keterkaitannya dengan berbagai aspek seperti perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Mengacu kepada *Papua Road Map* yang dibuat Tim Kajian Papua LIPI pada 2009, sumber konflik di Papua diindikasikan bersumber dari pelanggaran HAM masa lalu yang penyelesaiannya menggantung. Persoalan sejarah dan status politik, kegagalan pembangunan, hingga marjinalisasi masyarakat Papua juga menjadi faktor-faktor yang tidak dapat dihilangkan dari perhitungan. Berkaca pada faktor-faktor tersebut, keinginan untuk menuntaskan akar permasalahan di Papua seyogianya dapat dimulai dengan penyelesaian kasus kekerasan

dan pelanggaran HAM dengan mekanisme yang mampu mewujudkan pengadilan HAM yang adil dan transparan untuk mendukung rekonsiliasi.

Untuk mencari format atau model penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang tepat untuk memenuhi hak-hak korban dan tuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di Papua, Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua dengan dukungan Yayasan Tifa melangsungkan proyek kegiatan “Membangun Konsensus Masyarakat Sipil untuk Merumuskan Konsep dan Model Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Papua” dalam rentang waktu Agustus 2020 hingga Juli 2021. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mewujudkan upaya pemenuhan hak-hak korban atas kebenaran dan rekonsiliasi atas peristiwa pelanggaran HAM masa lalu di Papua. Lebih jauh, aktivitas ini juga bermaksud membangun kesepahaman antara pemerintah pusat dan Provinsi Papua terkait perlunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Papua sebagai wujud salah satu upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.

JERAT Papua merupakan organisasi yang fokus pada isu sumber daya alam serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di Tanah Papua. Lembaga ini dalam kerjanya secara khusus mendampingi masyarakat adat di tujuh wilayah adat di Provinsi Papua dan Papua Barat. Melalui kiprahnya, JERAT Papua telah menjadi motor dalam membangun gerakan bersama dari komponen masyarakat sipil untuk mendukung dialog HAM menuju rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini akan berperan sebagai pondasi dalam membangun pemahaman bersama dan mendorong pemenuhan HAM di Papua.

Rangkuman Gagasan Pembentukan KKR di Papua

Upaya-upaya membangun konsensus masyarakat sipil terkait KKR dalam proyek ini dilakukan melalui beberapa kegiatan utama, yaitu pengkajian tentang KKR, diskusi dan konsultasi dengan KKR Aceh dan para pakar, diskusi terfokus dengan beragam pemangku kepentingan, konsultasi publik di Jayapura, Wamena, dan Biak, serta diseminasi pokok-pokok pikiran KKR melalui media cetak dan elektronik. Secara umum, kajian dan diskusi-diskusi yang dilakukan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal tentang persoalan dalam pembentukan KKR di Papua.

Dari berbagai dialog dan kajian yang dilakukan tersebut, dapat ditarik beberapa poin penting

sehubungan dengan upaya mewujudkan KKR di Papua, antara lain adalah fungsi KKR yang diproyeksikan bisa menjadi mediator untuk penyelesaian masalah pelurusan sejarah dan pelanggaran HAM yang berat berdasar kearifan lokal atau asas-asas hukum adat Papua. Dari dialog-dialog tersebut juga didapatkan gambaran konsep tujuan dibentuknya KKR di Papua sebagai berikut:

- Mencari dan mengungkap kebenaran pelanggaran HAM yang berat masa lalu di Papua dengan menggelar penyelesaian sengketa secara non-yudisial.
- Menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu di luar pengadilan, guna mewujudkan perdamaian dan persatuan bangsa.
- Mengupayakan keadilan restoratif bagi korban dan keluarga korban.
- Mewujudkan rekonsiliasi atau perdamaian yang strategis bagi seluruh masyarakat demi persatuan nasional.
- Mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa yang akan datang.
- Membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah, dan
- Memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara.



Jika kita menilik pada level pusat, konsep KKR secara nasional yang dibangun oleh pemerintah mempunyai tiga pertimbangan, yaitu penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, penyelesaian menyeluruh terhadap pelanggaran HAM berat, dan adanya rekonsiliasi secara nasional. Pada konteks Papua, rentang waktu konflik yang panjang dan dimensi konflik yang beragam memerlukan komitmen yang lebih serius dari pemerintah pusat. Dalam hal ini, komitmen pemerintah dapat ditunjukkan melalui inisiatif untuk mendorong proses KKR, mulai dari proses pengungkapan kebenaran sampai pada terwujudnya rekonsiliasi tersebut.

Mengingat keunikan yang dimiliki Papua dari segi sosial dan budaya, agar rekonsiliasi dan proses penyelesaian konflik bisa mendapat penerimaan yang baik, konsolidasi konsep berbasis wilayah adat dapat menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan. Pendekatan ini dapat membantu mengidentifikasi konflik-konflik yang terjadi di Papua. Melalui pendekatan ini pula diharap banyak informasi-informasi yang dapat digali, khususnya dari daerah-daerah dengan jumlah kasus pelanggaran HAM yang relatif tinggi.

Pendekatan wilayah adat juga dapat menjadi sarana sosialisasi bahasan KKR ke level akar rumput. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang mengetahui potensi peran KKR dalam penyelesaian konflik di Papua, diharap gagasan terhadap pembentukan KKR bisa mendulang dukungan yang lebih besar.

Perjuangan Membangun Diskusi

Dalam perjalanannya, aktivitas membangun konsensus masyarakat sipil di Papua ini tidak lepas dari beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama adalah masih terbaginya pandangan antara kubu yang mendukung dan menentang pembentukan KKR di Papua.

Kelompok kontra pembentukan KKR menyatakan bahwa KKR Papua adalah upaya pemerintah lari dari tanggung jawab menyelesaikan pelanggaran HAM yang telah terjadi. Selain itu, dari pihak yang kontra juga muncul pandangan bahwa pembentukan KKR

Papua yang baru mulai diwacanakan pada tahun ke-20 implementasi otonomi khusus Papua adalah bagian dari pencitraan pemerintah Indonesia di kancah nasional dan internasional.

Di sisi yang berseberangan, dari perspektif kelompok yang mendukung terbentuknya KKR menyatakan bahwa keberadaan KKR ini berpeluang menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Adanya KKR juga dinilai dapat memfasilitasi pemulihan para korban dan mengawal pemenuhan hak-haknya. Menjembatani pandangan-pandangan dari kelompok yang berseberangan ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar konsensus bersama dapat dicapai.

Di samping perbedaan sudut pandang, selama proyek berjalan, sulitnya bertemu para narasumber, khususnya dari pihak DPR & MPR, juga menjadi tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan. Perlu persistensi dan jangka waktu yang tidak sebentar untuk membuat dan mengatur ulang jadwal pertemuan dan diskusi berkali-kali. Tidak hanya itu, situasi pandemi Covid-19 juga membuat para narasumber ragu untuk berdiskusi secara langsung. Namun, dengan upaya pendekatan yang dilakukan terus-menerus, proses diskusi secara langsung akhirnya dapat terlaksana.

Sinergi untuk Melanjutkan Gerakan

Seiring dengan interaksi dengan beragam pemangku kepentingan yang dilakukan dalam proses pembentukan konsensus, didapat banyak pengetahuan serta pemahaman baru tentang konsep umum maupun upaya-upaya mewujudkan KKR. Pemahaman ini disarikan dari berbagai diskusi yang telah dilakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat, baik di Indonesia maupun mancanegara, seperti Timor Leste dan Australia.

Pentingnya membangun jaringan kerja bersama mitra di tingkat Papua Barat, nasional, bahkan internasional juga menjadi pembelajaran penting yang didapat dari proyek kegiatan ini. Tidak hanya untuk mendapat dukungan, adanya jaringan kerja yang solid juga bisa menjadi modal yang kuat dalam mendorong pembentukan, pelaksanaan,

berbagi pengalaman, serta pemantauan terhadap penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.


Sosialisasi KKR juga menjadi aspek penting yang tidak dapat dilewatkan. Hal ini perlu untuk menjadikan isu KKR familiar bagi semua kalangan, tidak hanya milik perorangan atau kelompok tertentu. Dengan semakin familiarnya masyarakat terhadap bahasan KKR, diharap bisa muncul sebuah kesadaran bersama yang bermuara pada usaha kolektif dari seluruh elemen masyarakat di berbagai tingkatan.

Pada akhirnya, dialog dan upaya-upaya tentang mewujudkan KKR di Papua yang diselenggarakan dalam proyek ini bukanlah merupakan sebuah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan akan terus berlanjut demi memperkaya esensi dari KKR untuk mewujudkan Papua tanah damai yang sebenarnya.



KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI ACEH

Menyembuhkan Luka Konflik dan Pelanggaran HAM di Aceh

 Dukungan Yayasan Tifa terhadap penegakkan keadilan dan perjuangan untuk mencapai perdamaian di Aceh sudah dimulai sejak tahun 2002 dan terus berjalan hingga kini. Pada tahun 2003 misalnya, Yayasan Tifa mendukung pembentukan Pos Bantuan (PB) HAM di Aceh yang mula-mula bergerak di wilayah Aceh Timur, wilayah yang pada saat itu menjadi episentrum kekerasan dan konflik, untuk membantu masyarakat yang mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM memperoleh bantuan pendampingan, pembelaan hukum, serta perawatan medis dan konseling.

Kemudian sepanjang periode 2005–2007, menyambut perjanjian damai yang disetujui, Yayasan Tifa merintis inisiatif dengan kelompok masyarakat sipil di Aceh untuk membangun lembaga-lembaga baru yang sejalan dengan semangat perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Aceh. Inisiatif-inisiatif ini merupakan bagian dari proses pelebagaan pranata-pranata baru yang diharapkan dapat menjadi tonggak pendukung tercapainya cita-cita Aceh yang demokratis, adil, sejahtera, dan damai.

Satu bagian penting yang menjadi mandat bagi pelaksanaan perdamaian di Aceh adalah pembentukan lembaga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). KKR Aceh sejatinya merupakan lembaga yang menjadi tumpuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hak asasi manusia dan kekerasan yang terjadi di Aceh pada masa lalu, masa sebelum adanya kesepakatan damai yang ditandatangani pada tahun 2005. Bersamaan dengan pengadilan HAM, keberadaan lembaga ini diharapkan dapat membuka kebenaran, memulihkan martabat korban, dan melestarikan perdamaian di Aceh.

Lebih dari satu dekade kemudian, pada tahun 2018 Yayasan Tifa kembali memberi dukungan kepada KKR Aceh melalui proyek keadilan transisional bagi korban dan masyarakat Aceh pascakonflik. Adapun hasil yang diharapkan dari proyek yang berjalan selama tiga tahun hingga tahun 2021 ini adalah ditegakkannya keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh dan terbentuknya kohesi sosial masyarakat Aceh. Untuk mencapai dua hasil tersebut disadari bahwa penguatan KKR Aceh untuk



Workshop Menemukan Model dan Dstrategi Pelaksanaan Rekonsiliasi bersama Pemerintah Lokal di Bener Meriah
Foto: Dok. KKR Aceh untuk Yayasan Tifa

menjalankan mandatnya sangat penting untuk dilakukan. Selain itu, komitmen dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, baik di tingkat lokal maupun nasional, untuk mendukung proses rekonsiliasi di Aceh juga mutlak untuk didapatkan.

Menegakkan Keadilan bagi Korban Pelanggaran HAM Masa Lalu di Aceh

Dalam tiga tahun perjalanan proyek, tujuan memperkuat KKR sebagai lembaga diandalkan untuk menjalankan mandatnya terbilang berhasil. Hal ini terbukti dengan terealisasinya proses pengambilan pernyataan dengan sangat baik oleh petugas yang terlatih, sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas. Sampai dengan berakhirnya tahun ketiga program, KKR Aceh sudah mengambil sebanyak 4.606 pernyataan korban/saksi.

Dengan model pengambilan pernyataan yang baik yang telah ditunjukkan, KKR Aceh tidak hanya berhasil mengumpulkan data, fakta, dan informasi tentang pelanggaran HAM untuk menjadi dasar pengenalan bentuk dan pola pelanggaran HAM di Aceh pada masa konflik. Proses pengambilan pernyataan yang dilakukan juga telah meningkatkan kepercayaan sekaligus kesediaan masyarakat, khususnya korban pelanggaran HAM, untuk diambil pernyataannya. Tidak hanya itu, praktik yang andal dan simpatik ini juga telah membuat KKR Aceh

menerima dukungan dari organisasi masyarakat sipil lokal, para pihak yang terlibat konflik, serta para tokoh adat untuk membangun proyek rintisan proses rekonsiliasi berbasis kearifan lokal di wilayah Bener Meriah.

Di tingkat nasional, ikhtiar KKR Aceh ini juga mendapat dukungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK RI) yang bersedia memfilitasi KKR Aceh untuk dapat menyampaikan proses rekonsiliasi yang sedang dibangun di Aceh kepada Menkopolhukam RI. LPSK RI dan Komnas Perempuan RI hingga kini terus memberi dukungan dan asistensi kepada KKR Aceh dalam perumusan reparasi untuk pemulihan korban pelanggaran HAM di Aceh.

KKR Aceh juga menunjukkan kegigihan dalam meraih komitmen berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung proses-proses rekonsiliasi yang dilaksanakan. Bentuk nyata komitmen yang didapat tersebut adalah terbitnya Surat Keputusan Gubernur yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh tentang Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban Kepada Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ditandatangani pada Tanggal 27 Mei 2020 terhadap 245 korban/ahli waris. Menindaklanjuti Keputusan Gubernur tersebut, Pemerintah Aceh kemudian mengalokasikan dana reparasi dalam Anggaran Pemerintah Aceh tahun 2022. Kebijakan ini mendapat respons positif dan



apresiasi dari Menkopolhukam RI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan LPSK RI.

Tantangan, Kendala, dan Pembelajaran

Meski banyak capaian yang telah diraih, namun KKR Aceh juga tidak luput dari berbagai tantangan yang harus dihadapi selama proyek dilaksanakan. Secara internal misalnya, proses pembangunan mekanisme koordinasi yang lebih solid masih perlu diteruskan agar alur akses informasi dan komunikasi intraorganisasi dapat berjalan lebih lancar. Semakin baiknya mekanisme koordinasi ini nantinya selain diharapkan bisa membuka jalan bagi interkoneksi informasi yang lebih baik juga dapat meningkatkan kinerja kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam organisasi.

Sementara itu, dari sisi eksternal terdapat beberapa tantangan dan kendala pada saat pengumpulan pernyataan. Termasuk dalam kendala-kendala tersebut adalah keengganan korban memberi pernyataan, korban yang masih emosional, adanya harapan bantuan yang diterima, serta kecurigaan akan dimanfaatkan. Untuk itu, KKR Aceh selanjutnya perlu meningkatkan sinergi dengan para pemangku kepentingan yang ada di tingkat daerah, terutama lembaga pemerintah, tokoh adat, dan tokoh agama agar kepercayaan masyarakat bisa terbentuk dan terus terjaga.

Ke depan, pendekatan rekonsiliasi berdasarkan adat dan budaya Aceh yang dikembangkan dengan melibatkan lembaga adat, tokoh-tokoh adat, dan agama di Aceh diharap dapat mereduksi permasalahan serta bisa meminimalisir potensi konflik terulang agar perdamaian yang abadi bisa terjadi. Dengan semangat damai ini, KKR Aceh akan terus berupaya menjadi media masyarakat Aceh yang pernah merasakan, terdampak, atau mendengar kisah kekerasan di masa konflik untuk dapat sembuh dan tumbuh.

INSTITUT DIAN/INTERFIDEI

Menyuburkan Nilai Toleransi di Lingkungan Pendidikan



Karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk adalah aset yang berharga. Hidup damai di tengah berbagai budaya dan heterogenya masyarakat adalah dasar dari semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Namun, dalam perjalanannya, muncul tantangan-tantangan dalam mengelola keberagaman tersebut, salah satunya adalah intoleransi. Intoleransi sendiri ialah keengganan untuk menerima pandangan, keyakinan atau perilaku yang berbeda. Keengganan ini dapat menciptakan prasangka negatif, yang kemudian menjadi stigma terhadap pihak yang dianggap berbeda. Stigma tersebut apabila terinternalisasi dengan kuat pada kelompok-kelompok tertentu dapat memunculkan diskriminasi dan ketidakadilan terhadap pihak yang berbeda, terutama pada mereka yang lebih lemah, marjinal, atau terpinggirkan. Untuk itu, dalam konteks Indonesia sebagai bangsa dengan ragam budaya, intoleransi merupakan persoalan serius yang perlu dicegah dan diatasi.

Berkaca pada persoalan tersebut, Institut DIAN/Interfidei sebagai institusi non-profit yang aktif mempromosikan dialog dan kerja sama lintas iman di Indonesia, dengan dukungan Yayasan Tifa, menyelenggarakan program “Mengelola Perbedaan dalam Keberagaman di Lingkungan Sekolah Menengah Atas di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”. Melalui upaya-upaya penanaman cara pandang serta sikap-sikap yang toleran, program ini lebih jauh berupaya menekan perilaku-perilaku dan kasus-kasus intoleransi, yang muncul baik atas latar perbedaan agama, sentimen etnis, serta pandangan terhadap difabel, khususnya di lingkungan SMA/SMK di DIY.

Lingkungan sekolah memainkan peran penting dalam membangun ekosistem masyarakat yang toleran. Melalui mekanisme pendidikan yang tepat, guru bisa menjadi aktor yang menyampaikan pesan perdamaian, menanamkan pandangan kepada

para siswanya bahwa keragaman bukanlah sebuah ancaman, melainkan sebuah kekayaan yang harus dirayakan. Harapannya, dengan pengenalan nilai-nilai toleransi pada siswa, nilai-nilai ini akan lebih mudah tertanam, tumbuh, dan menyebar di lingkungan masyarakat.

Menjalin Kerja Sama dengan Berbagai Pemangku Kepentingan

Ada dua target utama yang ingin dicapai pada program ini. Pertama adalah adanya kebijakan dan ketegasan Pemerintah Daerah DIY untuk merawat keberagaman dan menghapus intoleransi di lingkungan SMA/SMK di wilayahnya. Sedangkan yang kedua adalah guru dan kepala sekolah SMA/SMK di DIY yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengelola perbedaan dalam keberagaman semakin banyak jumlahnya. Guru-guru dan kepala sekolah ini juga diharapkan bisa menjadi lebih terorganisir dalam mempromosikan pentingnya memupuk toleransi dan merawat keberagaman, baik di lingkungan sekolah mereka masing-masing maupun secara lebih luas pada lingkup dunia pendidikan di DIY.

Untuk mencapai kedua target di atas, Institut DIAN/Interfidei menyelenggarakan beberapa aktivitas. Pertama adalah melakukan pemetaan peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan usaha untuk merawat keberagaman dan menghapus intoleransi di lingkungan SMA/SMK di DIY. Berdasar pemetaan ini, ditemukan bahwa belum ada peraturan atau kebijakan yang secara spesifik ditujukan untuk mengatur tentang bagaimana merawat keragaman dan menghapus intoleransi di lingkungan SMA/SMK di DIY.

Selanjutnya, dalam mempromosikan perlunya kebijakan Pemerintah Daerah DIY di bidang ini, Institut DIAN/Interfidei juga melakukan pendekatan di tingkat provinsi, yakni melalui jalur Parampara Praja DIY, lembaga nonstruktural yang beranggotakan delapan ahli terpilih yang menjadi penasihat Sultan Hamengkubuwana X selaku Gubernur DIY dalam persoalan keistimewaan DIY. Dari komunikasi dan diskusi yang terjalin, Institut DIAN/Interfidei berkesempatan menyampaikan

bahasan mengenai praktik-praktik dan tantangan-tantangan penyelenggaraan budaya toleransi di DIY. Melalui jalur komunikasi ini pula, Institut DIAN/Interfidei mengajukan rekomendasi akan pentingnya mendorong pembiasaan untuk mengelola dan memaknai perbedaan dengan memberi perhatian khusus kepada dunia pendidikan dan generasi muda, termasuk sekolah menengah dan pelajar di DIY.

Selain Parampara Praja, komunikasi dan kerja sama dalam program ini juga dilakukan dengan melibatkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga (Disdikpora) DIY mengingat peran strategisnya dalam penyelenggaraan pendidikan di DIY. Melalui komunikasi yang terjalin, Disdikpora DIY menyambut dengan baik rencana dan tawaran kerja sama dari Institut DIAN/Interfidei untuk menyukseskan program mengelola perbedaan dan keragaman di lingkungan sekolah menengah atas. Bahkan, Disdikpora DIY bersedia untuk menyediakan ruang pertemuan untuk pelatihan serta menjadi pihak pengundang para guru dan kepala sekolah yang menjadi sasaran program ini.

Secara garis besar, dalam menjalankan program ini Institut DIAN/Interfidei menggunakan kombinasi pendekatan *top-down* dengan mendorong kebijakan Pemerintah Daerah DIY dan pendekatan *bottom-up* yang mengakomodir inisiatif masyarakat, dalam hal ini kepala sekolah dan guru, serta elemen-elemen lain yang relevan, termasuk di dalamnya adalah pemuda lintas iman di DIY. Terlibatnya berbagai pemangku kepentingan diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam berjalannya program ini, sehingga tujuan akhir mewujudkan sekolah sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi para siswa dari berbagai latar belakang untuk belajar dan berinteraksi bisa tercapai.

Adaptasi Terhadap Kondisi yang Tak Pasti

Program ini dimulai pada pertengahan tahun 2020 ketika penyesuaian-penyesuaian menghadapi pandemi COVID-19 tengah dilakukan. Adanya penyesuaian ini berdampak pada berubahnya format aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan, yang sebelumnya diproyeksikan dapat dilakukan secara langsung dengan tatap muka, harus diubah menjadi

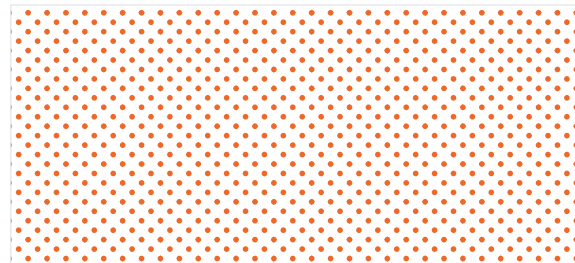
kegiatan daring. Hal ini membuat Institut DIAN/Interfidei memerlukan waktu untuk mempelajari tata cara dan aplikasi-aplikasi penunjang yang digunakan. Di masa awal pembelajaran ini, Institut DIAN/Interfidei terpaksa menunda sejumlah aktivitas, termasuk penyelenggaraan pelatihan mengelola dan memaknai perbedaan bagi guru serta kepala sekolah SMA/SMK di DIY. Dengan waktu pembelajaran yang dimiliki, Institut DIAN/Interfidei selaku penyelenggara program kemudian memahami dan menjadi lebih familiar dengan cara penggunaan teknologi-teknologi terbaru sekaligus membuka pengetahuan tentang cara penyelenggaraan kegiatan yang belum pernah dilakukan.

Di pertengahan masa berjalannya program, sempat muncul asumsi bahwa pandemi akan mereda pada bulan April-Mei 2021. Namun ternyata asumsi ini tidak terjadi. Masih tingginya kasus COVID-19 membuat beberapa kegiatan yang telah dirancang secara luring harus kembali diselenggarakan secara daring. Penyesuaian-penyesuaian ini menimbulkan konsekuensi terhadap perubahan jadwal kegiatan dan jumlah peserta yang berpartisipasi. Tidak hanya itu, perubahan-perubahan ini juga berdampak pada rentang waktu periode berjalannya program yang menjadi semakin panjang, dari sebelumnya dirancang selesai pada pertengahan tahun 2021, mundur hingga akhir tahun 2021. Penyesuaian-penyesuaian ini dilakukan agar program dapat berjalan dengan tempo yang ideal untuk mencapai keluaran dan solusi yang matang.

Selain dari penyesuaian format kegiatan, penyesuaian jadwal dan waktu diskusi juga menjadi tantangan yang harus dihadapi selama pelaksanaan program. Meski berbekal relasi yang baik, namun sehubungan dengan kesibukan dan padatnya kegiatan pihak Disdikpora dan Parampara Praja DIY, sering kali waktu audiensi dan pertemuan yang diagendakan harus dijadwalkan ulang. Kondisi ini membuat implementasi kegiatan yang membutuhkan dukungan atau kerja sama dengan Disdikpora maupun Parampara Praja DIY menjadi rentan tertunda. Di samping dengan pihak pemerintah daerah, kendala jadwal ini juga ditemui ketika berinteraksi dengan pihak guru dan kepala sekolah yang menjadi partisipan pelatihan dalam program

ini. Atas kesadaran bahwa masalah jadwal dan kesibukan ini tidak terelakkan, setiap pertemuan atau momen komunikasi yang terselenggara didorong agar lebih produktif. Hal ini ditujukan supaya komitmen bersama yang telah dicanangkan tidak terhenti di tengah jalan.

Secara garis besar, program ini memberi gambaran bahwa sebagai bagian dari tataran masyarakat yang luas, kita tidak bisa duduk diam dan menunggu perubahan terjadi, tantangan-tantangan di atas adalah bukti bahwa perlu tekad dan pemahaman bersama untuk membuka jalan bagi terciptanya masyarakat toleran yang dimulai dari institusi pendidikan. Ke depan, melalui pendekatan pengenalan nilai-nilai toleransi di institusi pendidikan, para remaja yang menjadi sasaran utama program ini diharap dapat melihat satu sama lain dengan kacamata kesetaraan. Dengan cara pandang ini, kekerasan dan kebencian yang lahir dari ketimpangan atau rasa intoleran bisa pelan-pelan mereda dan hilang.



LEMBAGA BANTUAN HUKUM MASYARAKAT

Menyusun Aksi Jauhi Sanksi Pidana Mati



Di tengah tren dunia yang menunjukkan penurunan angka kasus hukuman mati, sebaliknya di Indonesia justru masih menjadi polemik hak asasi manusia yang berkelanjutan. Asumsi soal efek jera hukuman mati yang bisa berdampak pada penurunan tindak pidana seperti narkoba, terorisme, dan pembunuhan berencana menjadi faktor dominan yang melatarbelakanginya. Padahal, salah satu alasan mengapa hukuman mati tidak diperlukan lagi adalah karena jenis hukuman ini tidak terbukti mampu mencegah terjadinya kejahatan berat, seperti pembunuhan atau terorisme. Eksekusi hukuman mati tidak membuat penjahat menjadi enggan melakukan kejahatan.

Melihat kondisi ini, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) berupaya mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia. LBHM sendiri adalah organisasi nonprofit yang memberi bantuan dan layanan hukum gratis bagi masyarakat miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia. LBHM juga melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat marjinal, melakukan advokasi

untuk reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui kampanye, litigasi strategis, advokasi kebijakan, dan penelitian.

Dalam upayanya mendorong penghapusan hukuman mati di Indonesia, LBHM sejauh ini telah bekerja memperkuat sistem bantuan hukum yang diberikan kepada terpidana mati dan orang-orang yang berisiko menerima hukuman mati. Dari pengalaman yang didapat selama bertahun-tahun membantu berbagai kasus hukuman mati, LBHM telah melakukan penyempurnaan metode bantuan yang diberikan, antara lain dengan mempertajam investigasi, meminta pendapat ahli, serta berjejaring dengan organisasi masyarakat sipil berskala internasional.

Dengan dukungan Yayasan Tifa, LBHM menjalankan program “Penguatan Sistem Pencegahan Hukuman Mati dan Eksekusi di Indonesia” yang telah dilaksanakan sejak September 2020 dan diproyeksikan akan selesai pada September 2022. Program ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu terpidana mati bisa mendapat bantuan hukum

untuk meringankan hukumannya, orang-orang yang berisiko dihukum mati menerima bantuan hukum untuk mencegah mereka menerima hukuman tersebut, dan masyarakat secara umum bisa memahami ketidakadilan dalam hukuman mati.

Memperkokoh Landasan Gerakan

Pada fase pertama program ini, LBHM telah melaksanakan beberapa kegiatan yang menunjang pencapaian tujuan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup peningkatan kapasitas pengacara LBHM, penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan hukuman mati, dan penyelenggaraan diskusi publik.

Terkait peningkatan kapasitas, berdasar pada kebutuhan para pengacara LBHM yang mendampingi beberapa kasus penting, LBHM memetakan kebutuhan materi-materi pembelajaran yang dapat mendukung pembelaan hukum yang diberikan. Materi-materi tersebut antara lain mencakup perspektif kriminologi dan viktimologi hukuman mati, penggunaan penelitian hukum dan sosial untuk kasus hukuman mati, perspektif hakim dalam menjatuhkan hukuman mati, perkembangan global gerakan penghapusan hukuman mati, dan tantangan serta peluang pendampingan kasus hukuman mati.

Selain peningkatan kapasitas melalui pembelajaran, sejak Januari 2021 LBHM juga menyelenggarakan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan hukuman mati dijatuhkan. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini melibatkan Reprieve dan Indonesian Judicial Research Society (IJRS), dua organisasi yang memiliki rekam jejak sangat baik di bidang advokasi menentang hukuman mati. Reprieve memiliki *database* orang Indonesia yang dijatuhi hukuman mati, dan IJRS merupakan organisasi yang memiliki keahlian mendorong reformasi pengadilan melalui penelitian berbasis bukti.

Dalam perjalanannya, penelitian ini telah mengidentifikasi dan mendalami 402 kasus hukuman mati di Indonesia sejak awal 2000 hingga 2020. Berangkat dari temuan tersebut, penelitian ini selanjutnya mengumpulkan data dari keputusan pengadilan dan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap hukuman mati,

seperti pasal yang dijatuhkan, liputan media, serta ketersediaan pengacara.

Di pertengahan tahun 2021, untuk memperkuat pendampingan hukum bagi warga yang berhadapan dengan sanksi pidana mati, LBHM menerbitkan *Modul Pelatihan untuk Pendampingan Orang yang Berhadapan dengan Hukuman Mati*. Modul ini berisi langkah-langkah pembelaan terhadap kasus hukuman mati, mulai dari persiapan, menyusun strategi argumentasi, pendampingan litigasi, cara-cara berhadapan dengan individu yang rentan, hingga edukasi dan pelibatan publik dalam proses advokasi. Sebagai bentuk refleksi yang menggambarkan situasi penjatuhan hukuman mati di Indonesia, modul ini menyertakan praktik-praktik pendampingan yang dilakukan LBHM.

Pada fase pertama program, LBHM juga telah menyelenggarakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran sekaligus mendorong partisipasi publik dalam upaya menghentikan praktik hukuman mati di Indonesia. Kampanye ini dimulai dengan diskusi daring dengan judul *Pengaruh Kesehatan Jiwa Terhadap Narapidana Mati*. Diskusi ini menghadirkan Merri Utami, pekerja migran Indonesia yang divonis hukuman mati akibat jeratan kasus narkoba, sebagai salah satu panelisnya.

Menindaklanjuti diskusi publik ini, LBHM melakukan kampanye permintaan grasi untuk Merri Utami menggunakan tagar #GrasiUntukMerri. Kampanye ini dilakukan dengan latar belakang bahwa sistem peradilan pidana tidak mempertimbangkan kerentanan ekonomi dan sosial yang menempatkan Merri Utami dalam pusaran perdagangan manusia. Pada kampanye ini, LBHM menerbitkan beberapa infografik untuk menjelaskan kasus Merri Utami sekaligus memantik partisipasi publik melalui petisi daring gerakan #GrasiUntukMerri.

Meneruskan Perjuangan Mencapai Tujuan

Selama berjalannya fase pertama program, disadari bahwa belum seluruh dampak yang diharapkan bisa tercapai. Sebagai contoh, meskipun kampanye digital #GrasiUntukMerri telah mampu menarik perhatian publik, namun dukungan-dukungan yang

muncul belum bisa memengaruhi pemerintah untuk menguatkan komitmen yang lebih besar terkait penghapusan hukuman mati di Indonesia.

Tantangan lain yang juga harus dihadapi dalam pelaksanaan program adalah terbatasnya kontak yang bisa dilakukan oleh LBHM terhadap kliennya. Selama pandemi, tahanan membatasi kunjungan pengacara, hal ini menyebabkan kontak hanya bisa terjadi melalui sambungan telepon dan internet. Kondisi ini tentu kurang ideal bagi LBHM untuk melakukan investigasi lebih lanjut maupun evaluasi kesehatan mental yang dibutuhkan.

Belajar dari tantangan dan capaian yang telah diperoleh, komitmen meningkatkan kualitas bantuan hukum yang diberikan bagi klien terpidana mati dan penelitian yang telah berjalan akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan. LBHM juga akan terus berupaya mengembangkan sistem pemantauan kasus yang diharapkan mampu mengidentifikasi orang-orang yang rentan mendapat hukuman mati. Seiring dengan sistem peradilan pidana yang perlahan kembali mengadili lebih banyak kasus, LBHM akan lebih proaktif dalam mengidentifikasi dan membantu kasus-kasus yang berpotensi mendapatkan hukuman mati. Tidak hanya itu, kampanye dan diskusi publik yang mengangkat ketidakadilan dalam hukuman mati juga akan kembali diselenggarakan agar pemahaman dan simpati masyarakat pada isu ini bisa bangkit kembali.



Formula Komunikasi di Tengah Pandemi

Krisis bukanlah sebuah hal yang asing bagi organisasi masyarakat sipil, termasuk Yayasan Tifa. Namun, berbeda dengan krisis-krisis ekonomi atau sosial yang pernah dihadapi sebelumnya, pandemi Covid-19 telah memukul berbagai aspek kehidupan secara sekaligus dalam skala yang sangat masif. Tidak hanya itu, bagi Yayasan Tifa khususnya, pandemi juga telah memunculkan tantangan baru di dalam pendekatan komunikasinya. Dengan pembatasan sosial dan anjuran untuk tetap tinggal di dalam rumah yang dikeluarkan, banyak kegiatan yang harus dirancang ulang, mulai dari disesuaikan kembali jadwalnya, diubah format penyelenggaraannya, hingga dibatalkan seutuhnya. Segala perubahan dan penyesuaian ini pada awalnya tentu menyulitkan Yayasan Tifa dalam membangun serta memelihara hubungan dengan para mitra dan para pemangku kepentingan pada skala lokal, nasional, maupun internasional.

Dengan tetap membawa semangat untuk mempromosikan masyarakat yang terbuka di Indonesia, Yayasan Tifa melangsungkan upaya-upaya penyesuaian strategi komunikasi. Hal ini dilakukan agar dukungan serta upaya-upaya melindungi hak-hak masyarakat yang rentan dan terpinggirkan bisa terus berjalan, terutama pada masa pandemi ini. Selama tahun 2021, penyesuaian

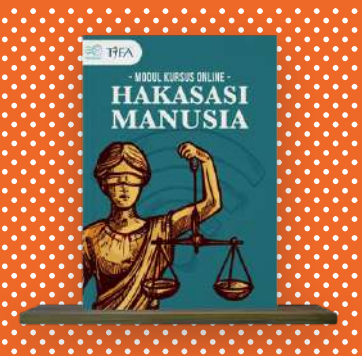
strategi komunikasi ini telah berjalan dengan cukup baik dan membuahkan 8 publikasi serta 21 kegiatan webinar dan diskusi publik yang terselenggara baik secara mandiri maupun dengan kolaborasi bersama mitra-mitra Yayasan Tifa.

Selain itu, di tengah keterbatasan yang ada, upaya konsolidasi dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, lembaga pemerintahan, akademisi, sektor privat, dan masyarakat sipil secara umum juga tetap dilakukan, baik secara daring maupun secara tatap muka terbatas sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Lebih lanjut, agar masyarakat tetap terhubung dengan isu-isu yang dikawal, Yayasan Tifa juga memperkuat diseminasi informasi melalui saluran media sosial. Sambutan baik upaya ini ditunjukkan dari peningkatan jumlah pengikut dan jumlah masyarakat yang terjangkau materi-materi informasi digital yang disirkulasikan lewat Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, dan Youtube Yayasan Tifa.

Dengan proyeksi optimis bahwa pandemi akan semakin terkendali, selain akan kembali mulai menyelenggarakan acara-acara dengan format tatap muka, Yayasan Tifa akan terus mengelola saluran digital yang dimilikinya serta mengemas materi-materi informasi terkait isu yang dikawal agar lebih menarik dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan.

**PUBLIKASI
& PRODUK KOMUNIKASI**

8 Publikasi berupa buku, modul, serta policy brief yang disusun mandiri dan bersama mitra-mitra kegiatan Yayasan Tifa selama 2021. Akses selengkapnya di tifafoundation.id.




**JANGKAUAN
MEDIA SOSIAL**

Per 31 Desember 2021


4.907
Pengikut


5.658
Pengikut


3.414
Pengikut


1.320
Pengikut


2.311
Pengikut



21 acara diskusi publik yang diselenggarakan secara daring selama tahun 2021. Enam di antaranya diorganisir secara mandiri oleh Yayasan Tifa, lima belas lainnya bekerja sama dengan para mitra. Acara-acara diskusi publik yang diselenggarakan mengangkat beragam topik yang menjadi fokus gerakan Yayasan Tifa seperti tata kelola data, pemenuhan hak asasi manusia, dan meningkatkan akses terhadap keadilan.

Swakelola

1. Tata Kelola Data dalam Digitalisasi Kesehatan, Refleksi dari Covid-19
2. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Program Pembangunan Melalui Pendekatan Evaluasi Program Berbasis Masyarakat
3. Konsolidasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan Hak Digital di Papua
4. Intermediary Liability Discussion: Social Media (Publisher vs. Non-publisher) Governance in Asia
5. Data Governance Accountability in the Pandemic.
6. Jurnalisme Digital dan Perannya pada Pendalaman Demokrasi

Bersama Mitra

1. Evaluasi Implementasi Perkap HAM dalam Mencegah Praktik Penyiksaan
2. Festival 45-45: Menemukan Kembali Indonesia
3. Indeks Dokumentasi dan Arsip Hak Asasi Manusia
4. Akselerasi Peningkatan Kualitas Layanan Bantuan Hukum Melalui Permenkumham Paralegal
5. Peluang dan Tantangan Pengesahan RUU Masyarakat Adat
6. Paralegal: Aktor dalam Peningkatan Akses Keadilan, Pembangunan dan Pelayanan Publik
7. Pelindungan PMI Melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang Berperspektif HAM dan Gender
8. Penegakan Hukum dalam Bayang-Bayang Penyiksaan
9. Bagaimana Dampak Pengesahan Revisi UU Otsus Terhadap Penyelesaian Konflik Papua?
10. Mendorong Implementasi Kebijakan Pelatihan Paralegal yang Mengakomodasi Stakeholders Bantuan Hukum
11. Webinar Hari Menentang Hukuman Mati - Masa Tunggu Hukuman Mati: Menunggu Grasi atau Eksekusi
12. Refleksi dan Langkah Pemulihan Diri Anak Muda Korban dan Penyintas KBB
13. Kolaborasi Multipihak untuk Perlindungan Anak yang Inklusif dan Resilien pada Masa Pandemi
14. Pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Infrastruktur Sebagai Fondasi Perdamaian di Papua
15. Keamanan Manusia di Papua

Melanjutkan Jalan ke Depan

Di Yayasan Tifa, kami berusaha untuk membuat perubahan melalui pelibatan, dialog, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam proses ini, kami merumuskan tiga elemen penting dalam pendekatan program yang kami jalankan serta dukungan yang kami berikan, meliputi hak asasi manusia, sumber daya alam, dan tata kelola digital.

Hak Asasi Manusia

Pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia masih menjadi isu yang krusial. Banyak hal-hal yang masih membutuhkan perhatian, mulai dari kesetaraan dalam pembangunan sosial dan ekonom hingga isu-isu dalam ranah agama, budaya, dan gender. Dalam pemenuhan HAM ini, elemen-elemen masyarakat sipil perlu mendesak peran aktif pemerintah dalam menerapkan kebijakan yang dapat melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran.

Tidak hanya itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia pelanggaran HAM juga dapat terjadi karena belum mendalamnya pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan satu sama lain. Padahal, penghormatan terhadap perbedaan dan keragaman semestinya bisa menjadi esensi dalam menumbuhkan pluralisme sekaligus membuat negeri ini semakin toleran dan damai.

Yayasan Tifa ke depan akan berperan aktif dengan memantau kinerja pemerintah dan melakukan advokasi hak asasi manusia melalui praktik diseminasi informasi, sosialisasi, dan advokasi. Hal ini dilakukan untuk mendorong pemerintah agar meningkatkan kinerjanya dalam melindungi hak-hak warga negara melalui penegakan hukum yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam di Indonesia diakui berperan penting dalam pembangunan ekonomi, sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara serta menyediakan pekerjaan dan mata pencaharian bagi banyak penduduknya. Namun, pengelolaan sumber daya alam di Indonesia selalu menjadi tantangan yang kompleks, yang kerap memunculkan benturan antara kepentingan lingkungan dan ekonomi yang dipertaruhkan.

Tantangan ini semakin diperumit oleh undang-undang “*omnibus law*” cipta lapangan kerja yang disahkan pemerintah pada Oktober 2020 lalu. Undang-undang tersebut mengatur salah satunya tentang tata cara pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam di Indonesia. Namun, paradoksnya, undang-undang ini justru diindikasikan tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi keberlangsungan sumber daya alam. Sebaliknya, omnibus law ini dianggap membuka peluang bagi para pelaku usaha-usaha ekstraktif berskala besar untuk menguasai sumber daya alam dan mengambil keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.

Lewat pendekatan sumber daya alam ini, Yayasan Tifa ingin memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat dari lingkungan yang ada di sekitar mereka. Kami bertekad memberdayakan masyarakat adat dan kelompok terpinggirkan agar dapat melakukan advokasi, membela diri, dan mengklaim hak-hak mereka atas sumber daya alam. Dalam program-program kami yang akan datang, pendekatan ini dirancang dengan tujuan meningkatkan akses yang adil terhadap pemanfaatan sumber daya alam untuk membangun ketahanan

lingkungan dan meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan.

Tata Kelola Digital

Perkembangan digital memiliki pengaruh besar pada aspek kehidupan manusia dewasa ini. Ditambah dengan hadirnya pandemi, semua proses interaksi, termasuk pengambilan keputusan sekarang berada di atas internet. Seiring dengan perkembangan kemampuan teknologi informasi itulah, munculnya banyak entitas multi sektor yang menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan data. Masyarakat menjadi dimudahkan dalam akses berbagai informasi juga menyimpan data di ranah digital. Perkembangan bukanlah tanpa konsekuensi karena teknologi dan data digital perlu pengaturan yang transparan agar akuntabel. Pada kondisi ini, kebutuhan akan perlindungan dan tata kelola data yang komprehensif untuk mengantisipasi penyalahgunaan data adalah sebuah keniscayaan.

Di tahun yang akan datang, Yayasan Tifa ingin terus menekankan pentingnya regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia untuk membagi tanggung jawab yang jelas antara badan-badan pemerintahan dan sektor privat. Selain itu, Tifa juga ingin meningkatkan kesadaran, literasi dan kemampuan teknis masyarakat sipil, termasuk di dalamnya para aktivis dan organisasi-organisasi masyarakat sipil, sehingga mereka dapat menggunakan teknologi dengan strategis, mengelola data dan informasi pribadi mereka dengan lebih baik dan memiliki kompetensi yang cukup untuk berakselerasi di era digital.

Dalam program dan dukungan yang akan kami laksanakan, pendekatan-pendekatan di atas akan saling terhubung dan berpengaruh satu dengan yang lain. Harapannya, konektivitas ini akan membuat seluruh pendekatan tersebut meraih kemajuan secara berkesinambungan, memperkaya nilai-nilai yang diusung Yayasan Tifa, dan mendukung kerja-kerja kami dalam mempromosikan masyarakat yang terbuka di Indonesia.*



Workshop Literasi Media Memahami dan Memproduksi Informasi Ramah Keberagaman
Foto: Dok. AJI Bandung untuk Yayasan Tifa



Laporan Keuangan



18 Office Park Lt. 15C-D
Jl. T.B Simatupang No. 18
Kebagusan - Pasar Minggu
Jakarta 12520
Telp. +62 (21) 2270-1427
Fax. +62 (21) 2278-3970

Email: public@tifafoundation.id
www.tifafoundation.id

**Surat Pernyataan Manajemen
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Yayasan TIFA
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2021**

**Statement Letter of Management
On the responsibility for Financial Statements of
Yayasan TIFA
For the year ended
31 Desember 2021**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

I, the undersigned

1. Nama : Shita Laksmi
Alamat Kantor : 18 Office Park, Lt. 15 / C-D
Jl TB Simatupang No 18

1. Name : Shita Laksmi
Office Address : 18 Office Park, Lt. 15 / C-D
Jl TB Simatupang No 18

Telepon : 021-2270 1427
Jabatan : Direktur Eksekutif

Telephone : 021-2270 1427
Title : Direktur Eksekutif

Menyatakan Bahwa:

Hereby State that:

1. Saya bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Yayasan TIFA untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021
2. Laporan keuangan Yayasan TIFA telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - a. Semua informasi dalam laporan keuangan Yayasan Tifa telah dimuat dengan lengkap dan benar.
 - b. Laporan keuangan Yayasan TIFA tidak mengandung informasi atau fakta yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
3. Saya bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Yayasan TIFA

1. I am responsible for the preparation and presentation of Yayasan TIFA's the financial statement for the years ended 31 Desember 2021
2. Yayasan TIFA's financial statements have been prepared and presented in accordance with generally accepted accounting principles in Indonesia;
 - a. The information contained in the Yayasan TIFA's financial statements is complete and corrected;
 - b. The Yayasan TIFA's financial statements do not contain incorrect material information or fact, and do not material information or fact;
3. I am responsible for Yayasan TIFA's internal control system.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is issued to the best of our knowledge and belief

Jakarta, 27 Juni 2022



Shita Laksmi
Direktur Eksekutif /
Executive Director

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

Report Number: 00663/2.0459/AU.1/11/0672-1/1/VI/2022

Board of Trustee, Supervisors, and Directors

We have audited the accompanying financial statements of Yayasan TIFA, which comprise the statement of financial position as of December 31, 2021, and statement of comprehensive income, and change in net assets and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management's determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material statements, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatements.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depends on the auditors' judgement, including the assesment of the risks of material misstatements of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risks assesment, the auditors' consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.



Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Yayasan TIFA as of December 31, 2021 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

Other Matter

The financial statements of Yayasan TIFA for the year ended December 31, 2020 were audited by another auditor who expressed an unmodified opinion on those financial statements dated August 27, 2021.

Our audit was conducted for the purpose of forming an opinion on the basic financial statements taken as a whole. The translation of the statement of financial position, statement of comprehensive income, statement of cash flows, and notes to the financial statements to United States Dollar is presented for convenience of readers based on the basis set out in Note 3 and is not a required part of the basic financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. Such translation has been subjected to our auditing procedures and, in our opinion has been prepared, in all material respects, in accordance with the basis set out in Note 3.

Heliantono and Partner

Padri Achyarsyah, CA., CPA.
Public Accountant License No. AP.0672



June 27, 2022

Yayasan TIFA
Statements of Financial Position
As of December 31, 2021

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2021		2020	
		Rp	USD*)	Rp	USD*)
CURRENT ASSETS					
Cash and banks	4	15,969,177	1,119,151	9,180,637	650,878
Receivables from Donors	5	190,228	13,332	12,506,801	886,692
Advances and prepayment	6	341,210	23,913	297,570	21,097
		16,500,615	1,156,396	21,985,008	1,558,667
NON-CURRENT ASSETS					
Fixed assets	2g;7	11,353,246	795,658	12,296,435	871,777
		11,353,246	795,658	12,296,435	871,777
TOTAL ASSETS		27,853,861	1,952,054	34,281,443	2,430,444
CURRENT LIABILITIES					
Grant payables	2k;8	4,285,109	300,309	18,068,049	1,280,966
Payables to donors	2k;9	10,574,068	741,052	1,403,670	99,516
Accruals and other liabilities	2k;10	474,278	33,238	639,755	45,357
Taxes payable	2k;11	34,618	2,426	37,926	2,689
		15,368,073	1,077,025	20,149,400	1,428,528
NON-CURRENT LIABILITIES					
Grant payables	2k;8	-	-	579,861	41,110
		-	-	579,861	41,110
NET ASSETS					
With restrictions from donor	2l;	315,358	22,224	1,748,780	127,011
Without restrictions from donor	2l;	12,170,430	852,896	11,803,402	821,035
Cumulative foreign currency translation differences		-	(91)	-	12,760
TOTAL NET ASSETS		12,485,788	875,029	13,552,182	960,806
TOTAL LIABILITIES AND NET ASSETS					
		27,853,861	1,952,054	34,281,443	2,430,444

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, June 27, 2022


Shita Laksmi
 Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA
Statements of comprehensive income
For the year ended December 31, 2021

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

Notes	2021												
	Without restrictions from donor				With restrictions from donor				Total				
	Rp	USD*)	Rp	USD*)	Rp	USD*)	Rp	USD*)	Rp	USD*)	Rp	USD*)	
INCOME													
Contribution income	367,028	25,690	7,346,361	514,207	7,713,389	539,897	6,499,244	444,987	12,644,471	865,736	19,143,715	1,310,723	
Grant return from previous years	-	-	2,216,406	155,137	2,216,406	155,137	-	-	1,517,115	103,873	1,517,115	103,873	
Interest income	-	-	61,042	4,273	61,042	4,273	-	-	65,064	4,455	65,064	4,455	
Other income	-	-	-	-	-	-	-	-	571,809	39,150	571,809	39,150	
Total Income	367,028	25,690	9,623,809	673,617	9,990,837	699,307	6,499,244	444,987	14,798,459	1,013,214	21,297,702	1,458,201	
EXPENSES													
Grant expenses	-	-	(255,780)	(17,903)	(255,780)	(17,903)	-	-	(8,822,007)	(604,021)	(8,822,007)	(604,021)	
Salaries and wages	-	-	(3,780,647)	(264,626)	(3,780,647)	(264,626)	-	-	(4,299,238)	(294,358)	(4,299,238)	(294,358)	
Professional fees	-	-	(1,442,115)	(100,941)	(1,442,115)	(100,941)	-	-	(651,381)	(44,598)	(651,381)	(44,598)	
Airfare	-	-	(290,930)	(20,364)	(290,930)	(20,364)	-	-	(35,506)	(2,431)	(35,506)	(2,431)	
Travelling expenses	-	-	(10,195)	(714)	(10,195)	(714)	-	-	(18,691)	(1,280)	(18,691)	(1,280)	
Depreciation	-	-	(1,026,170)	(71,827)	(1,026,170)	(71,827)	-	-	(1,027,409)	(70,748)	(1,027,409)	(70,748)	
Conference and meetings	-	-	(444,742)	(31,130)	(444,742)	(31,130)	-	-	(29,397)	(2,013)	(29,397)	(2,013)	
Utilities	-	-	(126,114)	(8,827)	(126,114)	(8,827)	-	-	-	-	-	-	
Local transportation	-	-	(386,832)	(27,076)	(386,832)	(27,076)	-	-	(46,406)	(3,177)	(46,406)	(3,177)	
Foreign exchange gain (loss), net	-	-	(1,082,495)	(75,769)	(1,082,495)	(75,769)	-	-	1,068,913	73,186	1,068,913	73,186	
Employee allowances	-	-	(1,289,372)	(90,249)	(1,289,372)	(90,249)	-	-	-	-	-	-	
Publication and printing	-	-	(166,249)	(11,637)	(166,249)	(11,637)	-	-	(2,686)	(184)	(2,686)	(184)	
Communication	-	-	(143,694)	(10,058)	(143,694)	(10,058)	-	-	-	-	-	-	
Office expenses	-	-	(421,897)	(29,531)	(421,897)	(29,531)	-	-	-	-	-	-	
Office Supplies	-	-	(59,703)	(4,179)	(59,703)	(4,179)	-	-	(9,231)	(632)	(9,231)	(632)	
Others	-	-	(130,298)	(9,120)	(130,298)	(9,120)	-	-	(2,338,334)	(160,101)	(2,338,334)	(160,101)	
Total Expenses	-	-	(11,057,231)	(773,951)	(11,057,231)	(773,951)	-	-	(16,211,373)	(1,110,357)	(16,211,373)	(1,110,357)	
SURPLUS (DEFICIT)	367,028	25,690	(1,433,422)	(100,334)	(1,066,394)	(74,644)	6,499,244	444,987	(1,412,914)	(97,143)	5,086,329	347,844	
Other comprehensive income	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COMPREHENSIVE INCOME	367,028	25,690	(1,433,422)	(100,334)	(1,066,394)	(74,644)	6,499,244	444,987	(1,412,914)	(97,143)	5,086,329	347,844	

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, June 27, 2022



Shita Laksmi
Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA

Statements of changes in net assets

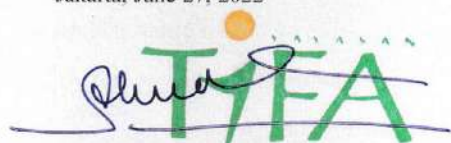
For the year ended Desember 31, 2021

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar)

	Notes	2021		2020	
		Rp	USD*)	Rp	USD*)
NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR					
Beginning balance:		11,803,402	821,035	5,304,158	381,567
Surplus (deficit), current year		367,028	25,690	6,499,244	444,987
Cummulative foreign currency translation difference - Beg		-	6,171	-	(5,519)
Net assets released from restriction	14	-	-	-	-
Ending balance		12,170,430	852,896	11,803,402	821,035
Other comprehensive Income					
Beginning balance		-	-	-	-
Other comprehensive Income, current year		-	-	-	-
Ending balance		-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITHOUT RESTRICTIONS FROM DONOR		12,170,430	852,896	11,803,402	821,035
NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR					
Beginning balance:		1,748,780	127,011	3,161,694	227,884
Surplus (deficit), current year		(1,433,422)	(100,334)	(1,412,914)	(97,143)
Cummulative foreign currency translation difference - Beg		-	(4,453)	-	(3,730)
Net assets released from restriction		-	-	-	-
Ending balance		315,358	22,224	1,748,780	127,011
Other comprehensive Income					
Beginning balance		-	-	-	-
Other comprehensive Income, current year		-	-	-	-
Ending balance		-	-	-	-
TOTAL NET ASSETS WITH RESTRICTIONS FROM DONOR		315,358	22,224	1,748,780	127,011
Current year		-	(91)	-	12,760
TOTAL CUMMULATIVE FOREIGN CURRENCY TRANSLATION DIFFERENCES		-	(91)	-	12,760
TOTAL NET ASSETS		12,485,788	875,029	13,552,182	960,806

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, June 27, 2022



Shita Laksmi
Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.

Yayasan TIFA
Statements of cash flows
As of December 31, 2021

(Expressed in thousands of Rupiah unless otherwise stated, and full amount of US Dollar*)

Notes	2021		2020	
	Rp	USD*)	Rp	USD*)
Cash flows from operating activities				
Change in net assets	(1,066,394)	(74,644)	5,086,330	347,844
Add/(deduct) items not affecting the operating cash flows:				
Depreciation	6 1,026,170	71,827	1,027,409	70,344
Unrealized foreign exchange gain	(44,666)	(3,126)	(65,037)	(4,611)
Changes in assets and liabilities				
Receivables from donors	12,316,573	862,097	11,615,307	795,272
Advances and prepayments	(43,640)	(3,055)	90,427	6,191
Grant payables	(13,782,940)	(964,735)	(8,404,638)	(575,445)
Payables to donors	9,170,398	641,881	1,403,670	99,516
Accruals and other liabilities	(165,477)	(11,583)	(1,099,356)	(75,270)
Taxes payable	(3,308)	(232)	10,082	690
Deferred income	-	-	-	-
Non-current liabilities	(579,861)	(40,587)	(3,858,734)	(264,198)
Net cash flows provided from (used in) operating activities	6,826,855	477,843	5,805,460	400,333
Cash flows from investing activity				
Purchases of fixed assets	6 (82,981)	(5,808)	(83,378)	(5,709)
Net cash flows used in investing activity	(82,981)	(5,808)	(83,378)	(5,709)
Net increase (decrease) in cash and banks for the year	6,743,874	472,035	5,722,082	394,624
Cash and banks at the beginning of the year	9,180,637	650,878	3,393,518	244,118
Effect of exchange rate changes on cash and banks	44,666	3,126	65,037	4,611
Foreign currency translation differences	-	(6,888)	-	7,525
Cash and banks at the end of the year	15,969,177	1,119,151	9,180,637	650,878

*) The United States Dollars financial statements are presented only for the convenience of readers and do not form part of the financial statements. Refer to Note 3 for the basis of translation.

Jakarta, June 27, 2022


Shita Laksmi
 Executive Director

The accompanying notes to financial statements form an integral part of these financial statements.



Yayasan Tifa adalah organisasi yang mempromosikan terwujudnya masyarakat terbuka melalui kerja sama strategis (strategic partnership) dengan masyarakat sipil di tingkat lokal, nasional, dan internasional dengan mengedepankan pendekatan pelibatan yang konstruktif (constructive engagement).

Berdiri sejak tahun 2000, Yayasan Tifa telah bekerja bersama dengan lebih dari 700 organisasi mitra yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kerjanya, Yayasan Tifa mengedepankan dialog dengan masyarakat sipil dan pemangku kebijakan, membangun jaringan dan mengkonsolidasi gerakan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat sipil.

Yayasan Tifa konsisten bergerak merespon isu-isu krusial yang mencakup transparansi dan akuntabilitas pemerintah, ekosistem data digital, penguatan demokrasi, keadilan transisional, sumber daya alam, dan pemenuhan hak-hak warga, termasuk di dalamnya hak asasi manusia kelompok rentan dan marjinal.



Yayasan Tifa

18 Office Park Building 15th Fl. Unit C-D
Jl. TB Simatupang No. 18 , RT.2/RW.1, Kebagusan, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
Email: public@tifafoundation.id
Website: www.tifafoundation.id

 Tifa Foundation
 @TifaFoundation
 @tifafoundation_id
 Yayasan Tifa